

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PT. Madubaru

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

F. Puput Pramudha Wardhana

NIM : 072114052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2013

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PT. Madubaru

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

F. Puput Pramudha Wardhana

NIM : 072114052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2013

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI TETAP**

Studi Kasus di PT. Madubaru

Oleh:

F. Puput Pramudha Wardhana

NIM : 072114052

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing



Drs. YP. Supardiyono., M.Si., Akt., QIA.

Tanggal : 7 November 2013

Skripsi
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di PT. Madubaru

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
F. Puput Pramudha Wardhana
NIM: 072114052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 November 2013
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Angraini.,M.Si.,Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani,S.E.,M.Si.,Akt.,QIA.	
Anggota	Drs.Y.P. Supardiyono.,M.Si.,Akt.,QIA.	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana.,M.Si.,Akt.,QIA.	
Anggota	Dr. Fr. Reni Retno Angraini.,M.Si.,Akt.	

Yogyakarta, 29 November 2013
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apa pun yang ingin Anda kerjakan, lakukan sekarang juga, karena akan banyak hal lain besok yang harus Anda kerjakan.

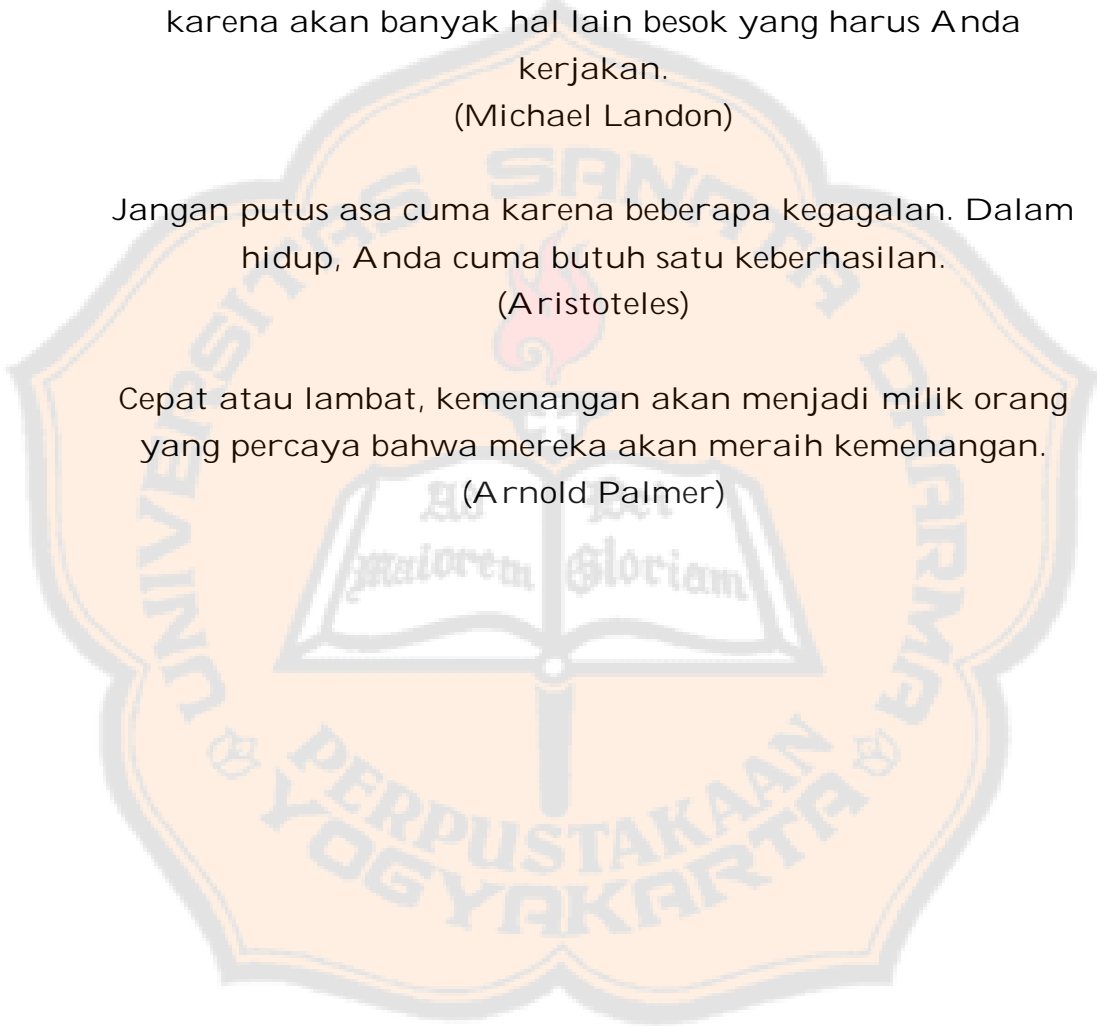
(Michael Landon)

Jangan putus asa cuma karena beberapa kegagalan. Dalam hidup, Anda cuma butuh satu keberhasilan.

(Aristoteles)

Cepat atau lambat, kemenangan akan menjadi milik orang yang percaya bahwa mereka akan meraih kemenangan.

(Arnold Palmer)



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Yesus Kristus pembimbing hidupku

Kedua orang tua ku atas perhatian dan doa yang tak pernah putus

Kakak-kakakku atas semangat dan dukungannya

Semua yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

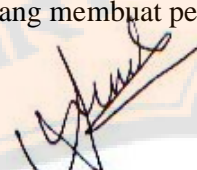
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP**, Studi Kasus di PT. Madubaru adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 7 November 2013
Yang membuat pernyataan,



F. Puput Pramudha Wardhana

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : F. Puput Pramudha Wardhana

NIM : 072114052

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap (Studi Kasus di PT. Madubaru) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 7 Februari 2013

Yang Menyatakan,



F. Puput Pramudha Wardhana

ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di PT. Madubaru**

F. Pramudha Wardhana
NIM : 072114052
Universitas Sanata Dharma
2013

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. Madubaru. Penelitian ini dilakukan karena diberlakukannya *With Holding System* yang memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan dapat dikenakan sanksi yang merugikan perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode komparasi yang bertujuan untuk membandingkan cara penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. Madubaru dengan cara penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap untuk penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Hanya saja dalam menerapkan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT. Madubaru belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 17 ayat 4, yaitu PT. Madubaru belum membulatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) ke dalam ribuan rupiah penuh.

ABSTRACT

**AN EVALUATION ARTICLE 21 – INCOME TAX CALCULATION
OF PERMANENT EMPLOYEE’S PAYROLL
Case Study on PT. Madubaru**

F. Pramudha Wardhana
NIM : 072114052
Sanata Dharma University
2013

This research was aimed to asses the income tax calculation chapter 21 in PT. Madubaru. This research was conducted because the implementation of With Holding System might cause inappropriate of income tax calculation which can harm the company.

This research is a case study. The data were gathered by conducting an interview and observing the archive. The technique of data analysis was comparison method which had a purpose to compare the way of Income Tax calculation chapter 21 which was done by PT. Madubaru with the tax regulation of PER-31/PJ/2009.

Based on the result data analysis it be concluded that the calculation of The Income Tax in article 21 for it’s permanent employee PT. Madubaru had been reffered to the taxation rule PER-31/PJ/2009. However the calculation of The Income Tax in article 21 done by PT. Madubaru had not followed the rounding regulation in the article 21.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

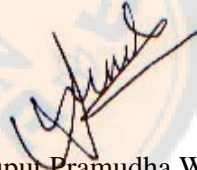
- a. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si.,Akt.,QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
- c. Ibu Retna Isharsriyana selaku Kabag SDM & Umum PT. Madubaru yang telah mengizinkan dilaksanakannya penelitian.
- d. Bapak FX. Dolah Wiyadi selaku Kepala Seksi Imbal Jasa yang telah memberikan banyak informasi saat dilaksanakannya penelitian di PT. Madubaru.
- e. Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang, doa, masukan, dukungan dan semangat yang tiada henti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- f. Saudara-saudariku Mas Steppa dan Mbak Vani atas doa dan dorongan semangatnya.
- g. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 7 November 2013


F. Puput Pramudha Wardhana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Pajak.....	6

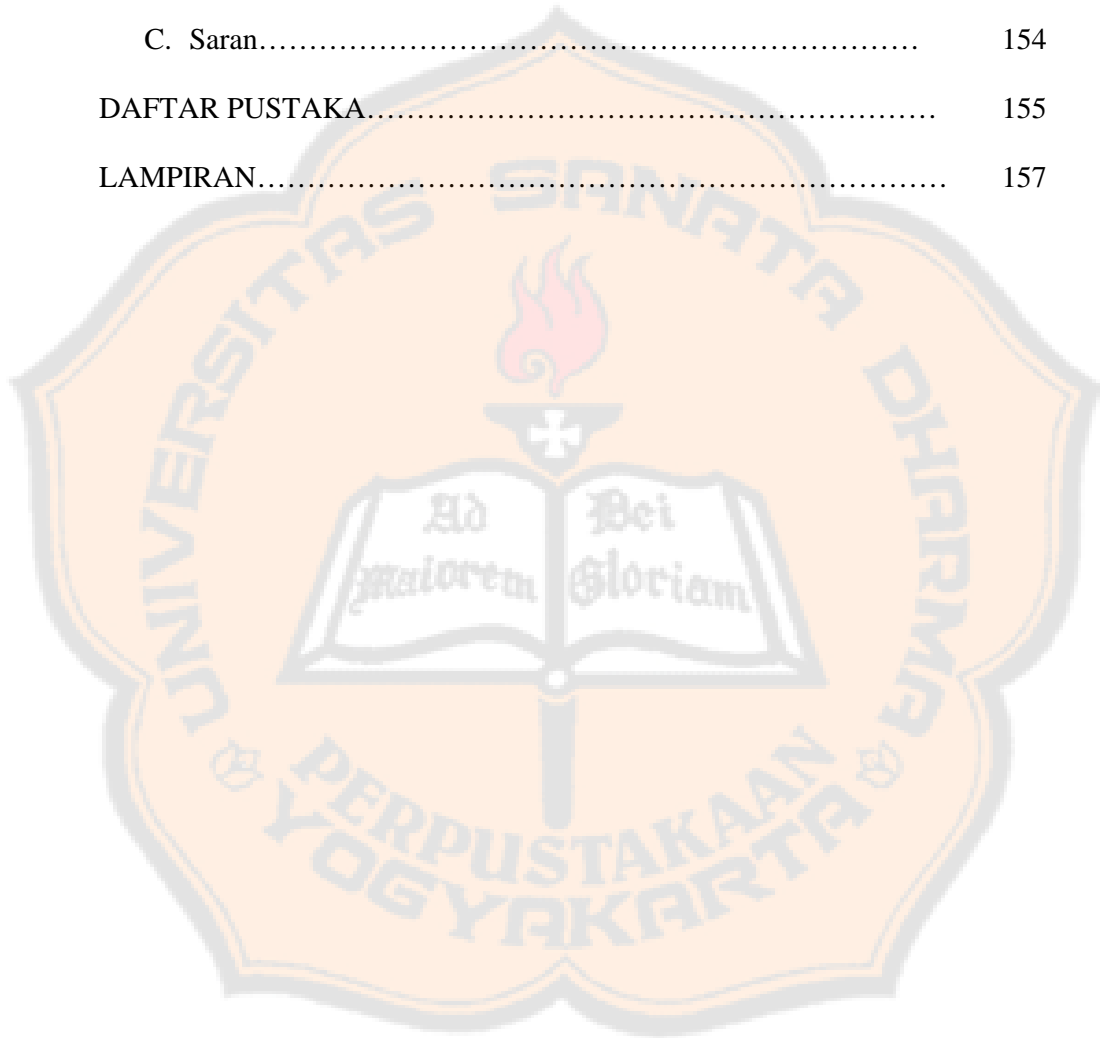
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Azas Pemungutan Pajak.....	10
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
7. Pengelompokan Pajak.....	14
8. Tarif Pajak.....	16
B. Pajak Penghasilan.....	16
1. Pengertian Penghasilan.....	16
2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	17
3. Dasar Hukum.....	17
4. Subjek Pajak.....	18
5. Obyek Pajak Penghasilan.....	19
6. Tarif Pajak Penghasilan.....	20
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	21
8. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.....	22
C. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
1. Pengertian Pajak Penghasilan 21.....	23
2. Golongan Pemotong PPh Pasal 21.....	23
3. Pemberi kerja yang tidak melakukan pemotongan.....	25
4. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	25
5. Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang	

dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.....	27
6. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.....	28
7. Tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	29
8. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.....	30
9. Tarif pemotongan Pajak dan Penerapannya menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.....	31
10. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.....	32
11. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
D. Data yang diperlukan.....	37
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	37
F. Teknik pengumpulan data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	43
A. Sejarah Singkat.....	43
1. PG-PS Madukismo.....	43
2. Lokasi.....	43
3. Pemilik Saham.....	44
4. Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Perusahaan.....	44
5. Stuktur Organisasi Fungsional PT. Madubaru.....	45
B. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan.....	45
1. Visi.....	45
2. Misi.....	46
3. Budaya Perusahaan.....	46
C. Produksi.....	47
D. Sumber Daya Manusia.....	47
E. Bidang Akuntansi dan Keuangan.....	48
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Data.....	53
B. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	58
1. Penentuan Penghasilan Teratur.....	58
2. Penentuan Penghasilan Tidak Teratur.....	91
C. Pembahasan.....	144
1. Penentuan Penghasilan Teratur.....	144
2. Penentuan Penghasilan Tidak Teratur.....	148

BAB VI PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Keterbatasan Penelitian.....	153
C. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....	157



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru.....	45



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Tarif Pajak.....	21
Tabel 3.1: Sampel pegawai tetap PT. Madubaru.....	38
Tabel.4.1: Kronologi Status Perusahaan dan perubahan Manajemen.....	44
Tabel 5.1: Data sampel pegawai tetap PT. Madubaru.....	55
Tabel 5.2:Perbandingan Cara menentukan Penghasilan Bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.....	59
Tabel 5.3: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW)	60
Tabel 5.4 Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW).....	60
Tabel 5.5: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	61
Tabel 5.6 Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	61
Tabel 5.7: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	62
Tabel 5.8: Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP).....	62

Tabel 5.9: Perbandingan Cara Menentukan Biaya Jabatan yang dilakukan PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	65
Tabel 5.10: Penghitungan Biaya Jabatan bulan Januari tahun 2012 yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	65
Tabel 5.11: Perbandingan Penentuan Iuran Pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	67
Tabel 5.12: Penghitungan Iuran Pensiun pada bulan Januari tahun 2012 PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	67
Tabel 5.13: Perbandingan Penentuan Penghasilan Neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	69
Tabel 5.14: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	70
Tabel 5.15: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW).....	70
Tabel 5.16: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	71
Tabel 5.17: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perpajakan (sampel JMD).....	71
Tabel 5.18: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	72
Tabel 5.19: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP).....	72
Tabel 5.20: Perbandingan cara menentukan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.....	74
Tabel 5.21: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	75
Tabel 5.22: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW)...	75
Tabel 5.23: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	76
Tabel 5.24: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD)...	76
Tabel 5.25: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	77
Tabel 5.26: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP)...	77
Tabel 5.27: Perbandingan Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan	

perundang-undangan perpajakan.....	79
Tabel 5.28: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	79
Tabel 5.29: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	80
Tabel 5.30: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku...	82
Tabel 5.31: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	83
Tabel 5.32: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW).....	83
Tabel 5.33: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	84
Tabel 5.34: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	84
Tabel 5.35: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	85
Tabel 5.36: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut	

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP).....	85
Tabel 5.37: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	87
Tabel 5.38: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	88
Tabel 5.39: Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW)...	88
Tabel 5.40: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	89
Tabel 5.41: Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	89
Tabel 5.42: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	90
Tabel 5.43: Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP)...	90
Tabel 5.44 Perbandingan cara menentukan Penghasilan Neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	93
Tabel 5.45: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	94
Tabel 5.46: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan	

peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW)...	94
Tabel 5.47: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	95
Tabel 5.48: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD)...	95
Tabel 5.49: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	96
Tabel 5.50: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP)...	96
Tabel 5.51: Perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	98
Tabel 5.52: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru (sampel FDW).....	99
Tabel 5.53: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW).....	100
Tabel 5.54: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru (sampel JMD).....	101
Tabel 5.55: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	102

Tabel 5.56: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru (sampel WNP).....	103
Tabel 5.57: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP).....	104
Tabel 5.58: Perbandingan cara menentukan Iuran Pensiun menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.....	106
Tabel 5.59: Perbandingan penghitungan Iuran Pensiun.....	106
Tabel 5.60 Perbandingan penentuan penghasilan neto setahun menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.....	108
Tabel 5.61 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	109
Tabel 5.62 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW)....	109
Tabel 5.63 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	110
Tabel 5.64 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD)...	110
Tabel 5.65 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	111
Tabel 5.66 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan	

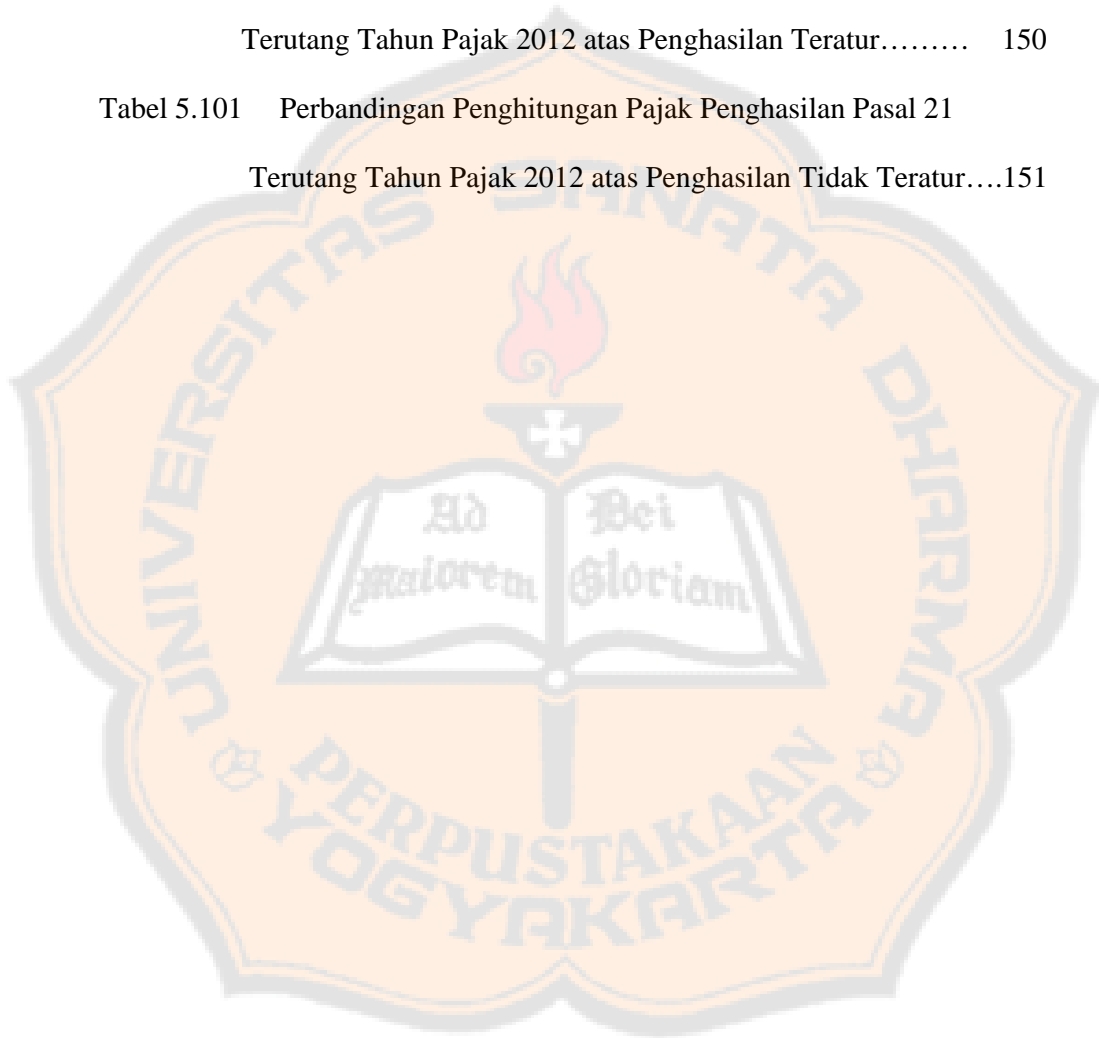
peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP)...	111
Tabel 5.67 Perbandingan cara menentukan PKP menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan...	112
Tabel 5.68 Perbandingan penghitungan PTKP yang dikenakan.....	113
Tabel 5.69 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	114
Tabel 5.70 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel FDW)...	114
Tabel 5.71 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	115
Tabel 5.72 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	115
Tabel 5.73 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	116
Tabel 5.74 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP)...	116
Tabel 5.75: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.....	117
Tabel 5.76 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel FDW).....	119
Tabel 5.77 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	

(sampel FDW).....	119
Tabel 5.78 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel JMD).....	120
Tabel 5.79 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel JMD).....	120
Tabel 5.80 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru (sampel WNP).....	121
Tabel 5.81 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (sampel WNP).....	121
Tabel 5.82 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel FDW).....	122
Tabel 5.83 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel FDW).....	123
Tabel 5.84 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel JMD).....	124
Tabel 5.85 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan	

Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel JMD).....	125
Tabel 5.86 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel WNP).....	126
Tabel 5.87 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel WNP).....	127
Tabel 5.88 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru (sampel FDW).....	130
Tabel 5.89 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel FDW)...	131
Tabel 5.90 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru (sampel JMD).....	132
Tabel 5.91 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel JMD)...	133
Tabel 5.92 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru	

(sampel WNP).....	134
Tabel 5.93 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel WNP)...	135
Tabel 5.94 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel FDW).....	138
Tabel 5.95 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel FDW).....	139
Tabel 5.96 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel JMD).....	140
Tabel 5.97 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel JMD).....	141
Tabel 5.98 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (sampel WNP).....	142
Tabel 5.99 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan	

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (sampel WNP).....	143
Tabel 5.100 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur.....	150
Tabel 5.101 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur....	151



BAB I
PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Sebagian besar penerimaan negara adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Dalam suatu perusahaan karyawan merupakan sumber daya yang sangat bernilai tambah. Namun, karyawan tidak luput dari pengenaan pajak yang memberi sumbangan kepada kas Negara. Karyawan yang dikenakan pajak ialah karyawan yang memiliki penghasilan dalam setahun lebih besar dari PTKP. Pajak yang berlaku bagi pegawai/ karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan biasanya sudah

otomatis dipotong oleh badan usaha (pemberi kerja) tempat karyawan tersebut bekerja. Oleh karena gaji dan upah yang diterima karyawan tersebut dikenai Pajak yang telah diatur dalam Pasal UU Nomor 36 tahun 2008 yang didalamnya terdapat tentang aturan besarnya tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak, maka perusahaan harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap terhadap pegawai harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap yang benar agar pajak pajak yang dipotong oleh perusahaan khususnya pegawai tetap tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana yang merugikan perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Madubaru telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan UU Perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 penulis dibatasi pada penghitungan Pajak Penghasilan untuk pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian tentang penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Madubaru telah mengacu dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER- 31/PJ/2009.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Universitas Sanata Dharma

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan dan referensi, dan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang membacanya.

- 2) Bagi Perusahaan yang teliti

Bagi perusahaan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi dan evaluasi terhadap penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan.

3) Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengetahuan tentang penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah serta memperluas wawasan berpikir.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah mengapa penulis memilih judul penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis pada pembahasan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dibahas oleh penulis sebagai dasar dalam menganalisis pada pembahasan.

BAB II : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, teknis analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

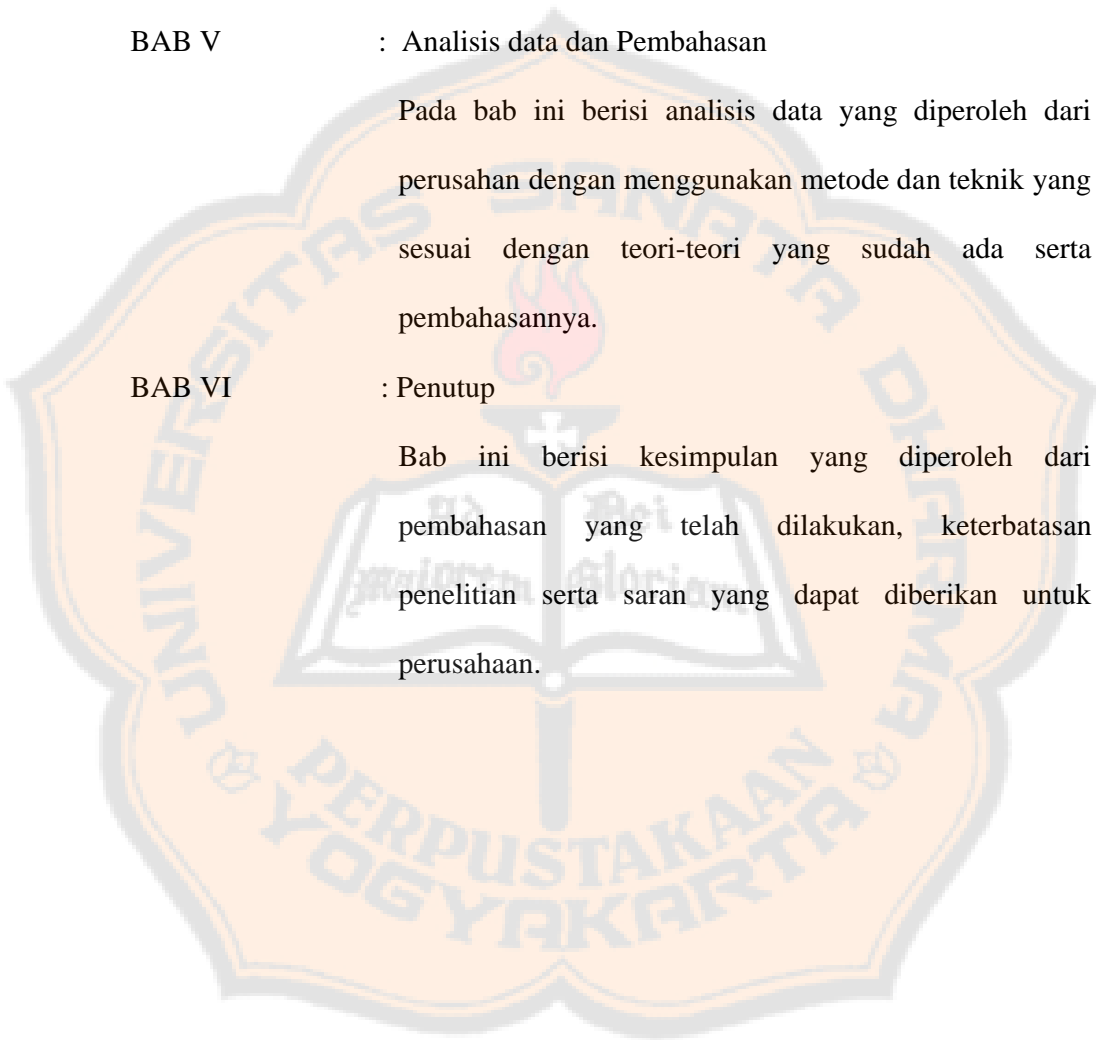
Bab ini berisi uraian tentang profil perusahaan yang berisikan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, bidang-bidang yang ada dalam perusahaan.

BAB V : Analisis data dan Pembahasan

Pada bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan teori-teori yang sudah ada serta pembahasannya.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Dari definisi-definisi yang ada, akan menjelaskan pengertian dari pajak tersebut. Berikut adalah definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain oleh:

Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Kemudian pengertian ini diperbaharui menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Prof.Dr.PJA. Andriani.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R,

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Undang-undang Pajak (UU No.28 Tahun 2007)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan definisi dan pengertian pajak dari beberapa ahli diatas, dapat diketahui fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Azas Pemungutan Pajak

Azaz pemungutan pajak menurut Mardiasmo, 2011: hal 7 adalah:

a. Azas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Azas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Azas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: hal 2-3) :

a. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, 2011: hal 7-8 adalah;

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang),
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Pengelompokan Pajak

- a. Pengelompokan Pajak menurut golongannya (Mardiasmo, 2011: hal 5) adalah;

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pengelompokan pajak menurut sifat (Mardiasmo, 2011: hal 5) adalah;

- 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2011: hal 6) adalah;

- 1) Pajak pusat yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai biaya rumah tangga daerah. Pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

8. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.
- b. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Pajak Degresif adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 yang dimaksud dari penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodic

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 yang dimaksud dari penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam setahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang –undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

3. Dasar Hukum

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan

pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.

Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. Subjek Pajak

Menurut UU 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam subjek pajak antara lain:

- a. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

5. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

6. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

b. PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 adalah PTKP

per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

- 1) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib pajak orang pribadi;
- 2) Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

8. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21' ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

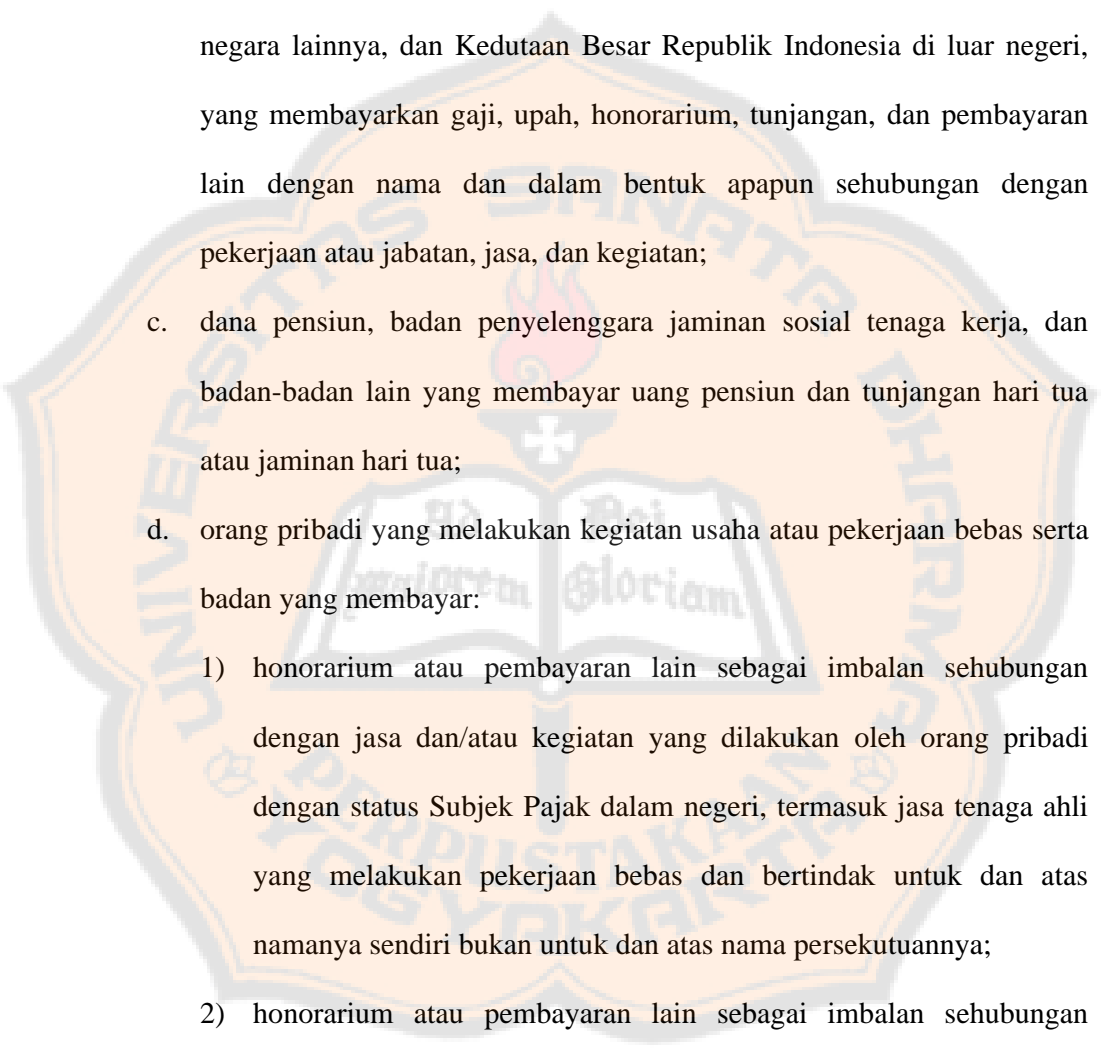
1. Pengertian Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009).

2. Golongan Pemotong PPh Pasal 21

Golongan Pemotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 meliputi:

- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- 
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- 1) honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Pemberi kerja yang tidak melakukan pemotongan

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

4. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 21 Nomor: PER-31/PJ/2009

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;

- 11) Petugas dinas luar asuransi;
- 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

5. Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong pph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

8. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

a. Pengertian Pegawai Tetap

Definisi pegawai tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 :

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

b. Pengertian Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja Tidak Tetap ada beberapa macam, yaitu: pekerja harian, pekerja mingguan, pekerja pabrik, pegawai honorer, karyawan lepas (tidak tetap). Adapun masing-masing definisi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja harian adalah buruh atau karyawan yang upahnya diperhitungkan dari jumlahnya kerjanya.
- 2) Pekerja mingguan adalah buruh atau karyawan yang upahnya dibayar seminggu sekali.
- 3) Pekerja Pabrik adalah buruh atau karyawan yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyelian.
- 4) Karyawan lepas adalah pegawai (buruh dan sebagainya) yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu).
- 5) Pegawai honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap dan setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

9. Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009

- 1) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - 2) dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu)

tahun adalah sebesar jumlah pada angka 1 ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

1) atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibagi 12 (dua belas);

2) atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

10. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009

a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja

merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan yang dibayar melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada badan Penyelenggara program Jamsostek.
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

- f. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- g. Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak kemudian setahun dikalikan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, sehingga didapatkan PPh Pasal 21 terutang setahun.
- h. Setelah diperoleh PPh terutang setahun, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yakni PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.

11. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

- a. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut;
 - 1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - 3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan angka 1 dan 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- b. Dalam hal bukan pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap PT. Madubaru serta mencari data yang berkaitan dengan PT.Madubaru dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi pendukung. Penelitian ini hanya berlaku pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pegawai tetap sebagai subjek pajak orang pribadi pada perusahaan yang diteliti.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah pajak terutang yang dipotong perusahaan selaku pemberi kerja atas penghasilan pegawai tetap dan selama tahun 2012.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli tahun 2013.

b. Tempat

Penelitian ini akan dilakukan pada PT.Madubaru.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data singkat perusahaan.
2. Data mengenai diri pegawai.
3. Data mengenai gaji pegawai tetap
4. Data mengenai jumlah pajak terutang yang telah dipotong oleh perusahaan.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgement Sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan.

PT. Madubaru memiliki 500 pegawai tetap yang kemudian oleh perusahaan diberikan sampel secara acak (*random sampling*) sebanyak 150 pegawai.

Peneliti menggunakan pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel yang dipilih, pertimbangan tersebut ditentukan dengan beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel pegawai tetap PT.

Madubaru yaitu pegawai yang memiliki NPWP, pegawai yang belum memiliki NPWP, dan karyawan. Peneliti menetapkan 3 pegawai tetap sebagai sampel untuk kemudian dilakukan penelitian. Data 3 pegawai tetap tersebut sudah memenuhi kriteria.

Tabel 3.1: Sampel pegawai tetap PT. Madubaru

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Status WP	Gaji Pokok
1	FDW	L	47.747.018.1-543.000	K/1	Rp3.270.000,00
2	JMD	L	-	K/1	Rp1.532.000,00
3	WNP	P	57.921.936.1-543.000	TK	Rp1.094.000,00

Sumber : PT. Madubaru

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini ada dua cara, antara lain:

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, kepada pemilik untuk mendapatkan data singkat perusahaan, serta melakukan tanya jawab kepada karyawan bagian keuangan yang menangani penghitungan gaji karyawan pada perusahaan ini.

2. Dokumentasi

Selain dengan wawancara, penelitian ini juga dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data, dokumen serta mempelajarinya dokumen yang telah didapat supaya dapat bermanfaat untuk penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode komparasi yakni membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh penulis yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT.Madubaru. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu idea kerja. Langkah-langkah teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang digunakan adalah :

1. Membandingkan antara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan Penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan perusahaan dengan penghitungan PPh menurut undang-undang perpajakan. Komponen yang dibandingkan yaitu:
 - a. Membandingkan Penentuan Penghasilan Teratur
 - 1) Cara menentukan penghasilan bruto sebulan.

- 2) Cara menentukan penghasilan neto sebulan.
- 3) Cara menentukan penghasilan neto setahun.
- 4) Cara menentukan penghasilan kena pajak (PKP) setahun.

5) Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun.

6) Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan.

b. Menarik kesimpulan apakah PT. Madubaru dalam melakukan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur sudah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, apabila semua komponen berikut ini dapat terpenuhi :

1) Cara menentukan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Cara menentukan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Cara menentukan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4) Cara menentukan penghasilan kena pajak (PKP) setahun yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5) Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6) Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Membandingkan Penentuan Penghasilan Tidak Teratur

1) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun.

2) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur.

3) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur.

3. Menarik kesimpulan apakah PT. Madubaru dalam melakukan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur sudah

mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, apabila semua komponen berikut ini dapat dipenuhi:

- 1) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan oleh perusahaan telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka penghitungan PPh yang dilakukan oleh perusahaan belum dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat

1. PG-PS Madukismo

PG-PS Madukismo adalah satu-satunya Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spiritus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan Nasional, khususnya Gula Pasir. Sebagai Perusahaan padat karya, banyak menampung tenaga kerja dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PG-PS Madukismo dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI yang pertama, Ir. Soekarno. Pabrik Gula Madukismo mulai berproduksi pada tahun 1958, dan Pabrik Spiritus mulai berproduksi pada tahun 1959.

2. Lokasi

PG-PS Madukismo berada di atas lokasi Bangunan Pabrik Gula Padokan (satu diantara 17 Pabrik Gula di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun Pemerintah Belanda, tetapi dibumi hanguskan pada masa pemerintahan Jepang), yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pemilik Saham

Pada awal berdiri, Saham sebesar 75% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan 25% milik Pemerintah RI (Departemen Pertanian RI). Pada saat ini, kepemilikan saham telah mengalami perubahan yaitu saham sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan 35% milik Pemerintah (dikuasakan kepada PT.Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN).

4. Kronologis Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen.

Tabel. 4.1 Kronologi Status Perusahaan dan perubahan Manajemen

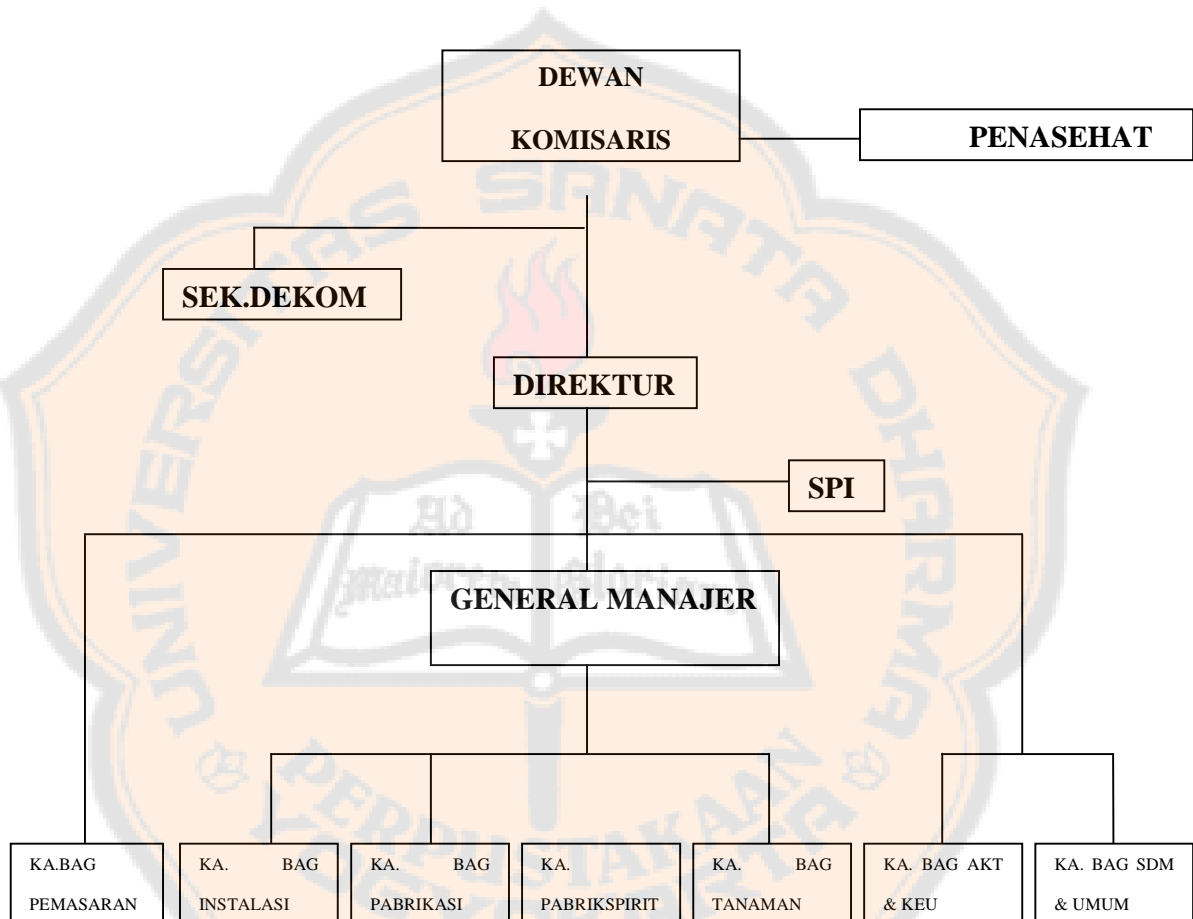
Tahun	Kronologis
1955-1962	Perusahaan Swasta (PT)
1962-1966	Bergabung dengan Perusahaan Negara dibawah BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Negara), karena adanya <i>policy</i> Pemerintah RI yang mengambil alih semua Perusahaan di Indonesia.
1966	BPU-PPN bubar. Pabrik-pabrik gula di Indonesia boleh memilh: tetap sebagai Perusahaan Negara atau keluar menjadi Perusahaan Swasta (PT). PT. Madu Baru memilih Perusahaan Swasta.
1966-1984	PT. Madu Baru kembali menjadi Perusahaan Swasta dengan susunan Direksi yang dipimpin Sri Sultan hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur.
1984-2004	Tanggal 4 Maret 1984-24 Februari 2004, diadakan kontrak Manajemen dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yaitu salah satu BUMN milik Departemen Keuangan RI.
2004-sekarang	PT. Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara professional dan independen.

Sumber: PT. Madu Baru

5. Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru

Gambar 4.1:

Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru



Sumber: PT. Madu Baru

B. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1. Visi

PT. Madu Baru, Yogyakarta menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

2. Misi

- a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
- b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
- c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
- d. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holders values*.

3. Budaya Perusahaan

- a. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jujur dan adil
- c. Rendah hati
- d. Terbuka
- e. Saling Menghormati
- f. Profesionalisme
- g. Kreatif
- h. Inovatif
- i. Teamwork
- j. Peduli Lingkungan

C. Produksi

PG-PS Madukismo memproduksi sekitar lima sampai enam bulan pertahun (24 jam/hari). Proses produksi berlangsung terus menerus antara bulan Mei s/d Oktober. Selain bulan tersebut, aktivitas di PG-PS Madukismo digunakan untuk memelihara mesin pabrik (servis, revisi, perbaikan, penggantian, dll).

Produksi utama dari PG Madukismo adalah Gula Pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produksi sampingan dari PS Madukismo adalah Alkohol Murni (kadar 95%) dan Spiritus Bakar (kadar 94%). Mutu dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT. Sucofindo Indonesia. Hasil produksi rata-rata PG menghasilkan Gula SHS + 35.000 ton per tahun dan untuk PS menghasilkan Alkohol 7,5-8 juta liter per tahun.

D. Sumber Daya Manusia

Karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta digolongkan berdasarkan sistem pengupahannya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana, dan karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan kerja waktu tertentu/KKWT (hanya bekerja pada masa produksi) dan karyawan borong (hanya bekerja jika ada pekerjaan borong). Jumlah karyawan PT. Madu Baru tahun 2012 adalah sebagai berikut: Karyawan Tetap berjumlah 499 orang dan Karyawan Tidak Tetap berjumlah 849 orang.

Pada Tahun 2000, organisasi karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta membentuk Serikat Pekerja PT. Madu Baru/SPPT Madu Baru, dan mulai tahun 2001 telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur tentang hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan. PT. Madu Baru juga memberikan beberapa Jaminan Sosial kepada karyawannya antara lain: Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan, Hak Pensiun untuk Karyawan Tetap (Pimpinan dan Pelaksana), Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua), Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT. Madu Baru, Perumahan Dinas untuk Karyawan Tetap, Poliklinik dan Klinik KB Perusahaan untuk semua Karyawan, Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk Karyawan dan Umum, Sarana Olah Raga dan Kesenian untuk Karyawan Tetap, Pakaian Dinas untuk Karyawan Tetap dan KKWT, Biaya Pengobatan, dan Rekreasi Karyawan dan Keluarga.

E. Bidang Akuntansi dan Keuangan

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga pokok historis. Laporan laba/rugi disusun berdasarkan *All Inclusive Concept*. Dana yang digunakan dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan adalah jumlah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

2. Piutang

Piutang dikelompokkan menurut tingkat penyelesaian yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi).

3. Pengakuan Nilai Persediaan

Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap semua persediaan yang ada pada tanggal laporan keuangan. Penilaian persediaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah harga pokok penjualan yang harus dikurangkan dari hasil penjualannya, dalam rangka penentuan laba rugi periodiknya. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui.

4. Persediaan Barang/Bahan

Metoda penentuan harga pokok persediaan barang/bahan adalah dengan menggunakan metoda rata-rata berjalan.

5. Cadangan Penyusutan

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metoda garis lurus tiap-tiap aktiva dikelompokkan menurut jenisnya dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Sedang untuk menghitung PPh Badan, penyusutan dihitung berdasarkan saldo menurun.

6. Utang

Utang disajikan dalam dua bagian, yaitu yang tingkat penyelesaiannya kurang dari satu tahun dibukukan sebagai utang lancar dan kewajiban utang yang harus diselesaikan pelunasannya lebih dari satu tahun, disajikan dalam neraca sebagai utang jangka panjang.

7. Pengakuan Pendapatan

Seperti yang tertulis dalam PSAK bahwa transaksi penjualan terjadi apabila ada peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Jadi pengeluaran pendapatan atas gula maupun tetes dibukukan apabila sudah diterbitkan faktur penjualan yang didasarkan atas DO Gula dan telah ditandatangani kontrak penjualan tetes, yang dimulai sebagai berikut:

- a. Pendapatan hasil gula diakui pada saat gula terjual dengan nilai sebesar harga penjualan.
- b. Pendapatan hasil tetes diakui pada saat tetes terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya.
- c. Pendapatan hasil Alkohol/Spiritus diakui pada saat Alkohol/Spiritus terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

8. Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basic*).

9. Komputerisasi

PT. Madu Baru menggunakan sistem akuntansi LAN (*Local AreaNetwork*) atau jaringan dengan sebuah bank data. Bidang-bidang yang sudah terkomputerisasi antara lain:

- a. Pembukuan (menggunakan sistem jaringan)
- b. Pengadaan bahan-bahan (menggunakan sistem jaringan)
- c. Pergudangan (menggunakan sistem jaringan)
- d. Penggajian (menggunakan sistem jaringan)
- e. Administrasi Tebangan (menggunakan sistem jaringan)
- f. Admistrasi Timbangan (menggunakan jaringan LAN)
- g. Instalasi (menggunakan jaringan LAN)
- h. Sekretariat (menggunakan jaringan LAN)
- i. Administrasi biaya tanaman (menggunakan jaringan LAN)
- j. Administrasi data tanaman (menggunakan jaringan LAN)
- k. Personalia (menggunakan jaringan LAN)
- l. Administrasi tebu rakyat (menggunakan jaringan LAN)
- m. Hubungan dengan kantor Pusat/Direksi menggunakan Internet

10. Pemasaran

a. Gula

Tahun 1998 s/d sekarang, Gula PG Madukismo dijual bebas, gulamilik Madukismo dijual sendiri oleh PG. Madukismo.

b. Alkohol dan Spiritus

Pemasaran untuk Alkohol dan Spiritus diatur sendiri oleh Perusahaan melalui distributor yang tersebar di beberapa daerah seperti: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Madubaru, Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 31/PJ/2009. Data utama yang diperlukan antara lain data diri pegawai yang meliputi nomor, Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, status (pegawai tetap), jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan jumlah penghasilan teratur maupun tidak teratur setiap pegawai.

Data-data yang diperoleh penulis dari PT.Madubaru antara lain data penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2012 yaitu dari bulan Januari sampe dengan Desember 2012, baik atas penghasilan teratur maupun tidak teratur bagi pegawai tetap, kemudian daftar data diri pegawai yang meliputi status (pegawai tetap), jenis kelamin, status kawin dan gaji pokok. Berikut data-data yang diperoleh dari PT. Madubaru untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis:

Data pegawai yang diperoleh adalah jumlah pegawai tetap berjumlah 500 (lima ratus) orang / pegawai. Penulis mengambil 3 orang / pegawai sebagai sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu fungsi NPWP adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan demikian, kewajiban untuk memiliki NPWP melekat pada setiap wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a) yang menyebut bahwa “Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka terdapat perbedaan dalam menghitung besarnya pajak bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP dan yang belum mempunyai NPWP.

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP adalah ingin membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai yang sudah memiliki NPWP dan pegawai yang belum memiliki NPWP.

2. Pegawai belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a), menyatakan bahwa wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari pegawai yang sudah memiliki NPWP. Begitu juga di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, diatur mengenai tarif bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan 21 yang terutang bagi pegawai yang belum memiliki NPWP.

3. Karyawati

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa besarnya PTKP bagi karyawati berlaku hanya untuk dirinya sendiri kecuali kalau ada surat keterangan dari Kantor Kecamatan di tempat tinggal karyawati tersebut yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tabel 5.1: Data sampel pegawai tetap PT. Madubaru

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Status WP	Gaji Pokok
1	FDW	L	47.747.018.1-543.000	K/1	Rp.3.270.000,00
2	JMD	L	-	K/1	Rp.1.532.000,00
3	WNP	P	57.921.936.1-543.000	TK	Rp.1.094.000,00

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan menguraikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada setiap kriteria dengan masing-masing kriteria diwakili oleh 1 (satu) sampel.

Penulis menggunakan data-data dari PT. Madubaru dalam melakukan analisis data. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan formula dari PT. Madubaru. Berikut ini adalah formula yang digunakan PT. Madubaru untuk menghitung pajak :

1) Penghitungan PPh 21 atas penghasilan teratur adalah :

Penghasilan bruto setahun = Gaji Pokok + Tunjangan lainnya

Pengurangan :

Biaya jabatan = 5% x Penghasilan Bruto (maksimal biaya jabatan adalah Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun).

Iuran pensiun = 2% x Gaji Pokok

Penghasilan Neto setahun = Penghasilan Bruto setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun :

- Wajib Pajak = Rp15.840.000,00
- Status Kawin = Rp1.320.000,00
- Tanggungan = Rp1.320.000 x jumlah tanggungan (maksimal 3)

Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto setahun – PTKP

PPh Pasal 21 terutang setahun = PKP x tarif pajak (pasal 17)

PPh Pasal 21 terutang sebulan = PPh setahun dibagi 12

2) Penghitungan PPh 21 atas penghasilan tidak teratur adalah :

a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur

Penghasilan bruto setahun + THR = (Gaji Pokok + Tunjangan lainnya) + THR

Pengurangan :

Biaya jabatan = 5% x Penghasilan Bruto (maksimal biaya jabatan adalah Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun).

Iuran pensiun = 2% x Gaji Pokok

Penghasilan Neto setahun = Penghasilan Bruto setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun :

- Wajib Pajak = Rp15.840.000,00
- Status Kawin = Rp1.320.000,00
- Tanggungan = Rp1.320.000 x jumlah tanggungan (maksimal 3)

Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto setahun – PTKP

PPh Pasal 21 terutang setahun = PKP x tarif pajak (pasal 17)

PPh Pasal 21 terutang sebulan = PPh setahun dibagi 12

- b) Penghitungan PPh Pasal atas penghasilan tidak teratur : (PPh Pasal atas penghasilan teratur dan tidak teratur dikurangi PPh Pasal atas penghasilan teratur).

B. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk menyelesaikan masalah terkait penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis akan membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur pegawai tetap yang dilakukan PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur untuk pegawai tetap yang dilakukan PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Perbandingan penentuan penghasilan bruto sebulan

Penentuan penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 yakni dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang terdiri dari gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Cara menentukan penghasilan bruto sebulan menurut PT. Madubaru yakni dengan menghitung seluruh komponen penghasilan bruto sebulan atau diperoleh sebulan. PT. Madubaru menghitung

penghasilan bruto berupa gaji pokok dengan menambahkan berbagai macam tunjangan yang telah diringkas mejadi satu.

Perbandingan penentuan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2: Perbandingan Cara menentukan Penghasilan Bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	Keterangan
Cara menentukan penghasilan bruto	Penghasilan bruto = Gaji pokok + segala jenis tunjangan yang telah dijadikan satu	Penghasilan bruto = gaji pokok + segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (<i>overtime</i>) dan pembayaran sejenisnya.	Cara menentukan Penghasilan Bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Penghasilan Bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
Jumlah		4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000

Sumber : Data diolah

Tabel 5.4: Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
Jumlah		4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000

Sumber : Data diolah

Tabel 5.5: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
Jumlah		2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	30,887,200

Sumber : Data diolah

Tabel 5.6 Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
Jumlah		2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	30,887,200

Sumber : Data diolah

Tabel 5.7: Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Caji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
Jumlah		1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400

Sumber : Data diolah

Tabel 5.8: Penghitungan penghasilan bruto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Caji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
Jumlah		1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400

Sumber : Data diolah

Dari penghitungan penghasilan bruto diatas cara penghitungan penghasilan bruto sebulan PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan memasukkan komponen penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yakni berupa gaji pokok dan tunjangan.

Dalam menentukan penghasilan bruto sebulan PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Penentuan penghasilan neto sebulan

Penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, penentuan jumlah penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja melalui Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara program Jamsostek.

Penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru dimulai dari menghitung penghasilan bruto setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan serta iuran pensiun. Cara penghitungan pengurang penghasilan neto sebulan sebagai berikut:

1) Biaya jabatan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun. Cara penentuan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.

Penentuan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru dengan menentukan tarif 5% dari penghasilan bruto dan menetapkan ketentuan setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) untuk setahun sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9: Perbandingan Cara Menentukan Biaya Jabatan yang dilakukan PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	Keterangan
Cara menentukan biaya jabatan	Biaya Jabatan = 5% x penghasilan bruto (setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.)	Biaya Jabatan = 5% x penghasilan bruto (setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.)	Cara Menentukan Biaya Jabatan yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.10: Penghitungan Biaya Jabatan bulan Januari tahun 2012 yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Penghasilan Bruto	4.583.500	2.258.600	1.798.700	4.583.500	2.258.600	1.798.700
2	Biaya Jabatan	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Jumlah sebulan		229.175	112.930	89.935	229.175	112.930	89.935
Jumlah setahun		2.750.100	1.355.160	1.079.220	2.750.100	1.355.160	1.079.220

Sumber: Data diolah

Berdasarkan penghitungan biaya jabatan yang dilakukan, PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penentuan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dalam PER-31/PJ/2009 Pasal 10 Ayat (3), karena penghitungan biaya jabatan yang dilakukan nilai paling besar biaya jabatan adalah Rp500.000 untuk sebulan dan Rp6.000.000 untuk setahun.

2) Iuran Pensiun

Penentuan iuran pensiun menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, iuran pensiun dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara program Jamsostek. Jumlah iuran pensiun diperoleh dari 2% dikalikan dengan gaji pokok setiap pegawai.

Cara penentuan iuran pensiun yang dilakukan PT. Madubaru diperoleh dari 2% dikalikan gaji pokok setiap pegawai. Penentuan iuran pensiun yang dilakukan PT. Madubaru dengan menggunakan tarif 2% dikalikan dengan gaji pokok setiap pegawai sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbandingan cara menentukan iuran pensiun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11: Perbandingan Penentuan Iuran Pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	Keterangan
Cara menentukan iuran pensiun	Iuran pensiun = 2% x Gaji pokok	Iuran pensiun = 2% x Gaji pokok	Cara menentukan Iuran Pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Iuran Pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.12: Penghitungan Iuran Pensiun pada bulan Januari tahun 2012 PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Gaji Pokok	3.270.000	1.532.000	1.094.000	3.270.000	1.532.000	1.094.000
2	Iuran Pensiun	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Jumlah sebulan		65.400	30.640	21.880	65.400	30.640	21.880
Jumlah setahun		784.800	367.680	262.560	784.800	367.680	262.560

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penghitungan iuran pensiun yang dilakukan, PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, penentuan jumlah penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Cara penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pension serta iuran astek.

Perbandingan penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13: Perbandingan Penentuan Penghasilan Neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan neto	Penghasilan neto = Gaji pokok – biaya jabatan – Iuran pensiun – iuran Astek	Penghasilan neto = Gaji pokok – biaya jabatan – Iuran pensiun ,dll	Cara menentukan Penghasilan Neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Penghasilan Neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.14: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000
2	Biaya Jabatan	229,175	204,175	204,875	202,875	204,150	257,375	219,913	314,713	217,313	219,913	217,313	2,715,600
3	Iuran Pensiun	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	823,300
4	Iuran Astek	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	106,350	106,350	106,350	106,350	106,350	106,350	1,234,950
	Jumlah	4,190,825.00	3,715,825.00	3,729,125.00	3,691,125.00	3,715,350.00	4,712,875.00	4,001,087.50	5,802,287.50	3,951,687.50	4,001,087.50	3,951,687.50	49,538,150.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.15: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000
2	Biaya Jabatan	229,175	204,175	204,875	202,875	204,150	257,375	219,913	314,713	217,313	219,913	217,313	2,715,600
3	Iuran Pensiun	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	823,300
4	Iuran Astek	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	106,350	106,350	106,350	106,350	106,350	106,350	1,234,950
	Jumlah	4,190,825.00	3,715,825.00	3,729,125.00	3,691,125.00	3,715,350.00	4,712,875.00	4,001,087.50	5,802,287.50	3,951,687.50	4,001,087.50	3,951,687.50	49,538,150.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.16: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	30,887,200
2	Biaya Jabatan	112,930	112,930	114,230	111,630	112,930	114,230	114,230	151,350	141,450	144,050	141,450	1,544,360
3	Iuran Pensiun	30,640	30,640	30,640	30,640	30,640	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	402,680
4	Iuran Astek	45,960	45,960	45,960	45,960	45,960	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	604,020
Jumlah		2,069,070	2,069,070	2,093,770	2,044,370	2,069,070	2,081,270	2,081,270	2,786,550	2,598,450	2,647,850	2,598,450	28,336,140

Sumber : Data diolah

Tabel 5.17: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	30,887,200
2	Biaya Jabatan	112,930	112,930	114,230	111,630	112,930	114,230	114,230	151,350	141,450	144,050	141,450	1,544,360
3	Iuran Pensiun	30,640	30,640	30,640	30,640	30,640	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	402,680
4	Iuran Astek	45,960	45,960	45,960	45,960	45,960	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	53,460	604,020
Jumlah		2,069,070	2,069,070	2,093,770	2,044,370	2,069,070	2,081,270	2,081,270	2,786,550	2,598,450	2,647,850	2,598,450	28,336,140

Sumber : Data diolah

Tabel 5.18: Penghitungan penghasilan neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400
2	Biaya Jabatan	89,935	89,935	91,235	88,635	89,935	101,735	101,735	149,035	99,135	101,735	99,135	1,220,320
3	Iuran Pensiun	21,880	21,880	21,880	21,880	21,880	25,880	25,880	25,880	25,880	25,880	25,880	290,560
4	Iuran Astek	32,820	32,820	32,820	32,820	32,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	435,840
Jumlah		1,654,065	1,654,065	1,678,765	1,629,365	1,654,065	1,868,265	1,868,265	2,766,965	1,818,865	1,868,265	1,818,865	22,459,680

Sumber : Data diolah

Tabel 5.19: Penghitungan penghasilan neto sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400
2	Biaya Jabatan	89,935	89,935	91,235	88,635	89,935	101,735	101,735	149,035	99,135	101,735	99,135	1,220,320
3	Iuran Pensiun	21,880	21,880	21,880	21,880	21,880	25,880	25,880	25,880	25,880	25,880	25,880	290,560
4	Iuran Astek	32,820	32,820	32,820	32,820	32,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	38,820	435,840
Jumlah		1,654,065	1,654,065	1,678,765	1,629,365	1,654,065	1,868,265	1,868,265	2,766,965	1,818,865	1,868,265	1,818,865	22,459,680

Sumber : Data diolah

Dari penghasilan penghasilan neto yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu telah memasukkan komponen penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun.

Berdasarkan penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukan, PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Penentuan penghasilan neto setahun

Penentuan penghasilan neto setahun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

Penentuan penghasilan neto setahun menurut PT. Madubaru adalah penghasilan neto sebulan kemudian dikalikan 12.

Perbandingan penentuan penghasilan neto setahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20: Perbandingan cara menentukan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan neto setahun	Penghasilan neto setahun = penghasilan neto sebulan x 12	Penghasilan neto setahun = penghasilan neto sebulan x 12	Cara menentukan Penghasilan Neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Penghasilan Neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.21: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	4,190,825	3,715,825	3,729,125	3,691,125	3,715,350	4,712,875	4,011,087	5,082,287	3,951,687	4,011,087	3,957,687	49,538,150
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	50,289,900	44,589,900	44,749,500	44,293,500	44,584,200	56,554,500	48,133,044	60,987,444	47,420,244	48,133,044	47,492,244	49,538,150

Sumber : Data diolah

Tabel 5.22: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	4,190,825	3,715,825	3,729,125	3,691,125	3,715,350	4,712,875	4,011,087	5,082,287	3,951,687	4,011,087	3,957,687	49,538,150
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	50,289,900	44,589,900	44,749,500	44,293,500	44,584,200	56,554,500	48,133,044	60,987,444	47,420,244	48,133,044	47,492,244	49,538,150

Sumber : Data diolah

Tabel 5.23: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	2,069,070	2,069,070	2,093,770	2,044,370	2,069,070	2,081,270	2,081,270	2,786,550	2,598,450	2,647,850	2,598,450	28,336,140
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	24,828,840	24,828,840	25,125,240	24,532,440	24,828,840	24,975,240	24,975,240	33,438,600	31,181,400	31,774,200	31,181,400	28,336,140

Sumber : Data diolah

Tabel 5.24: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	2,069,070	2,069,070	2,093,770	2,044,370	2,069,070	2,081,270	2,081,270	2,786,550	2,598,450	2,647,850	2,598,450	28,336,140
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	24,828,840	24,828,840	25,125,240	24,532,440	24,828,840	24,975,240	24,975,240	33,438,600	31,181,400	31,774,200	31,181,400	28,336,140

Sumber : Data diolah

Tabel 5.25: Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	1,654,065	1,654,045	1,678,765	1,629,365	1,654,065	1,868,265	1,868,265	2,766,965	1,818,865	1,868,265	1,868,265	22,459,680
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	19,848,780	19,848,540	20,145,180	19,552,380	19,848,780	22,419,180	22,419,180	33,203,580	21,826,380	22,419,180	22,419,180	22,459,680

Sumber : Data diolah

Tabel 5.26: Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto sebulan	1,654,065	1,654,045	1,678,765	1,629,365	1,654,065	1,868,265	1,868,265	2,766,965	1,818,865	1,868,265	1,868,265	22,459,680
2	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	-
	Jumlah	19,848,780	19,848,540	20,145,180	19,552,380	19,848,780	22,419,180	22,419,180	33,203,580	21,826,380	22,419,180	22,419,180	22,459,680

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4) Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penentuan PKP setahun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Cara penentuan PKP setahun menurut PT. Madubaru adalah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Cara penghitungan PKP dapat dilihat pada tabel.

Perbandingan penentuan PKP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.27: Perbandingan Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PKP	PKP = penghasilan neto setahun - PTKP	PKP = penghasilan neto setahun - PTKP	Cara menentukan PKP yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Tabel 5.28: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Uraian	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Wajib pajak orang pribadi	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
2	Wajib pajak yang kawin	1,320,000	1,320,000		1,320,000	1,320,000	
3	Anggota keluarga sedarah dan	1,320,000	1,320,000		1,320,000	1,320,000	
Jumlah PTKP		18,480,000	18,480,000	15,840,000	18,480,000	18,480,000	15,840,000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan Penghasilan Neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan PKP sebagai berikut:

Tabel 5.29: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Penghasilan neto setahun	49,538,150	28,336,140	22,459,680	49,538,150	28,336,140	22,459,680
2	PTKP	18,480,000	18,480,000	15,840,000	18,480,000	18,480,000	15,840,000
Jumlah PKP		31,058,150	9,856,140	6,619,680	31,058,150	9,856,140	6,619,680
Pembulatan PKP					31,058,000	9,856,000	6,619,000

Sumber : Data diolah

Dari perbandingan penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru ditemukan perbedaan hasil penghitungan yaitu jumlah PKP belum dibulatkan dalam ribuan penuh.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 17 ayat (4) menyatakan bahwa jumlah PKP sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dibulatkan hingga ribuan penuh. Besarnya PTKP sesuai dengan kriteria masing-masing pegawai. Berdasarkan penghitungan PKP

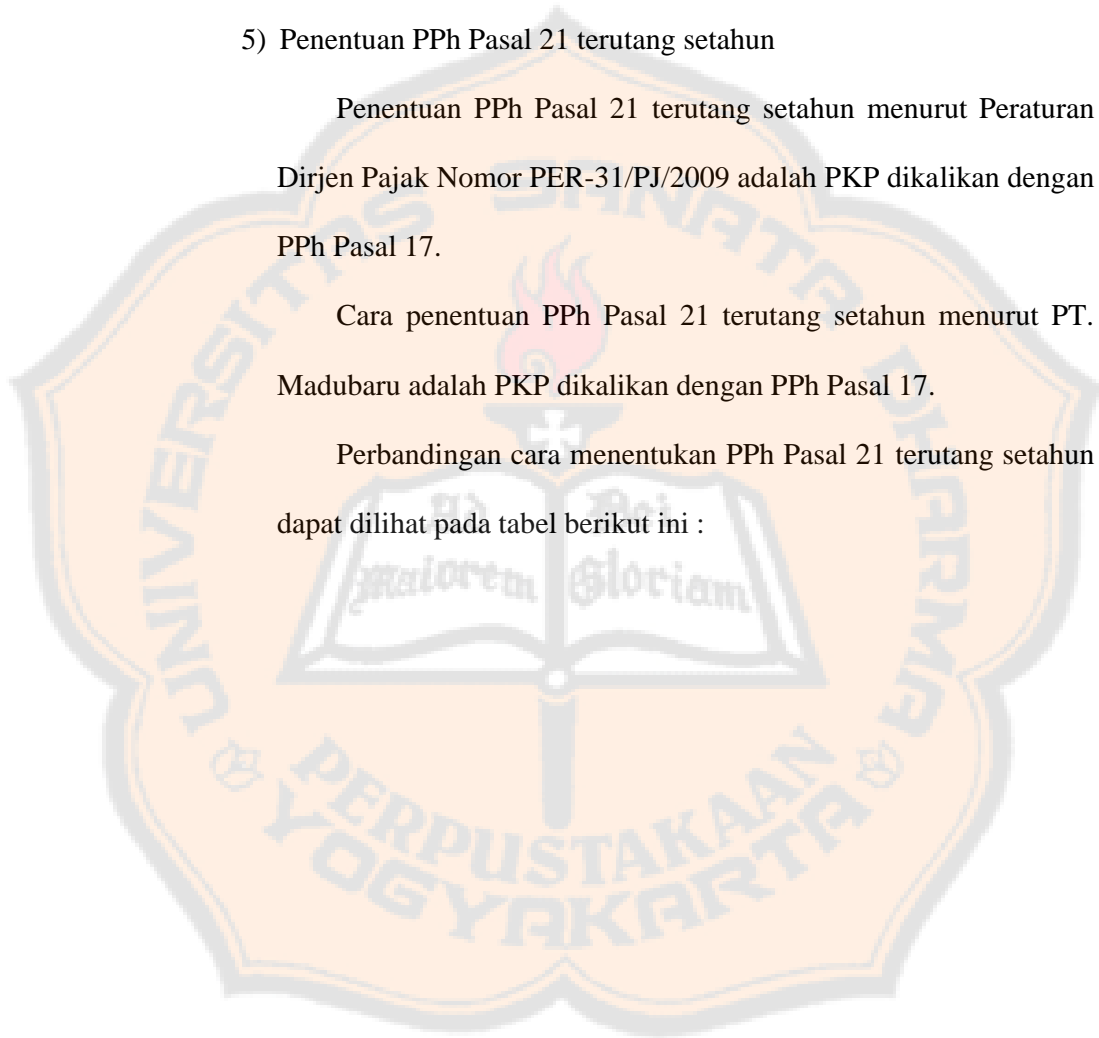
yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5) Penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun

Penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah PKP dikalikan dengan PPh Pasal 17.

Cara penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut PT. Madubaru adalah PKP dikalikan dengan PPh Pasal 17.

Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.30: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun	$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = \text{PKP} \times \text{PPh Pasal 17}$	$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = \text{PKP} \times \text{PPh Pasal 17}$	Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.31: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	31,809,900	26,109,900	26,269,500	25,813,500	26,104,200	38,074,500	29,653,044	42,507,444	28,940,444	29,653,044	29,012,244	31,058,150
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	1,590,495	1,305,495	1,313,475	1,290,675	1,305,210	1,903,725	1,482,652	2,125,372	1,447,022	1,482,652	1,450,612	1,552,908
	15%												
Jumlah		1,590,495	1,305,495	1,313,475	1,290,675	1,305,210	1,903,725	1,482,652	2,125,372	1,447,022	1,482,652	1,450,612	1,552,908

Sumber : Data diolah

Tabel 5.32: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	31,809,000	26,109,000	26,269,000	25,813,000	26,104,000	38,074,000	29,653,000	42,507,000	28,940,000	29,653,000	29,012,000	31,058,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	1,590,450	1,305,450	1,313,450	1,290,650	1,305,200	1,903,700	1,482,650	2,125,350	1,447,000	1,482,650	1,450,600	1,552,900
	15%												
Jumlah		1,590,450	1,305,450	1,313,450	1,290,650	1,305,200	1,903,700	1,482,650	2,125,350	1,447,000	1,482,650	1,450,600	1,552,900

Sumber : Data diolah

Tabel 5.33: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	6,348,840	6,348,840	6,645,240	6,052,240	6,348,840	6,495,240	6,495,240	14,958,600	12,701,400	13,294,200	12,701,400	9,856,140
2	Tarif pajak pasal 17												
	120% X 5%	380,930	380,930	398,714	363,134	380,930	389,714	389,714	897,516	762,084	797,652	762,084	591,368
	15%												
	Jumlah	380,930	380,930	398,714	363,134	380,930	389,714	389,714	897,516	762,084	797,652	762,084	591,368

Sumber : Data diolah

Tabel 5.34: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	6,348,000	6,348,000	6,645,000	6,052,000	6,348,000	6,495,000	6,495,000	14,958,000	12,701,000	13,294,000	12,701,000	9,856,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	120% X 5%	380,880	380,880	398,700	363,120	380,880	389,700	389,700	897,480	762,060	797,640	762,060	591,360
	15%												
	Jumlah	380,880	380,880	398,700	363,120	380,880	389,700	389,700	897,480	762,060	797,640	762,060	591,360

Sumber : Data diolah

Tabel 5.35: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	4,008,780	4,008,780	4,305,180	3,712,380	4,008,780	6,579,180	6,579,180	17,363,580	5,986,380	6,579,180	6,579,180	6,619,680
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	200,439	200,439	215,259	185,619	200,439	328,959	328,959	868,179	299,319	328,959	328,959	330,984
	15%												
Jumlah		200,439	200,439	215,259	185,619	200,439	328,959	328,959	868,179	299,319	328,959	328,959	330,984

Sumber : Data diolah

Tabel 5.36: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	4,008,000	4,008,000	4,305,000	3,712,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	17,363,000	5,986,000	6,579,000	6,579,000	6,619,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	200,400	200,400	215,250	185,600	200,400	328,950	328,950	868,150	299,300	328,950	328,950	330,950
	15%												
Jumlah		200,400	200,400	215,250	185,600	200,400	328,950	328,950	868,150	299,300	328,950	328,950	330,950

Sumber : Data diolah

Dari penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah menggunakan komponen PKP dikalikan dengan PPh Pasal 17 yang telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6) Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan

Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (1 tahun = 12 bulan).

Cara penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut PT. Madubaru adalah PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12 (1 tahun = 12 bulan).

Perbandingan penentuan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.37: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan	PPh Pasal 21 sebulan = PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12	PPh Pasal 21 sebulan = PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12	Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.38: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	1,590,495	1,305,495	1,313,475	1,290,675	1,305,210	1,903,725	1,482,652	2,125,350	1,447,022	1,482,652	1,450,612	1,552,908
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		132,541	108,791	109,456	107,556	108,768	158,644	123,554	177,113	120,585	123,554	120,884	129,409

Sumber : Data diolah

Tabel 5.39: Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	1,590,450	1,305,450	1,313,450	1,290,650	1,305,200	1,903,700	1,482,650	2,125,350	1,447,000	1,482,650	1,450,600	1,552,900
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		132,538	108,788	109,454	107,554	108,767	158,642	123,554	177,113	120,583	123,554	120,883	129,408

Sumber : Data diolah

Tabel 5.40: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	380,930	380,930	398,714	363,134	380,930	389,714	389,714	897,516	762,084	797,652	762,084	591,368
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		31,744	31,744	33,226	30,261	31,744	32,476	32,476	74,793	63,507	66,471	63,507	49,281

Sumber : Data diolah

Tabel 5.41: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	382,680	380,880	398,700	363,120	380,880	389,700	389,700	897,480	762,060	797,640	762,060	591,360
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		31,890	31,740	33,225	30,260	31,740	32,475	32,475	74,790	63,505	66,470	63,505	49,280

Sumber : Data diolah

Tabel 5.42: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	200,439	200,439	215,259	185,619	200,439	328,959	328,959	868,179	299,319	328,959	328,959	330,984
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		16,703	16,703	17,938	15,468	16,703	27,413	27,413	72,348	24,943	27,413	27,413	27,582

Sumber : Data diolah

Tabel 5.43: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPh Pasal 21 terutang setahun	200,400	200,400	215,250	185,600	200,400	328,950	328,950	868,150	299,300	328,950	328,950	330,950
2	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12
Jumlah		16,700	16,700	17,938	15,467	16,700	27,413	27,413	72,346	24,942	27,413	27,413	27,579

Sumber : Data diolah

Dari penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Madubaru telah menggunakan komponen PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12 (1 tahun = 12 bulan) yang telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur untuk pegawai pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penulis dalam melakukan analisis data dan pembahasan dengan menggunakan informasi tentang berbagai penghasilan yang diterima oleh pegawai yakni berupa gaji teratur dan tunjangan Hari Raya serta tunjangan lain yang diterima oleh pegawai. Penulis juga menganalisis berbagai biaya dari pegawai tetap yakni meliputi biaya iuran, penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai tetap, dengan menganalisis berbagai biaya diatas yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan yang dilakukan perusahaan sudah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 1) Menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun

Penghitungan penghasilan bruto untuk penghasilan teratur dan tidak teratur dilakukan dengan cara menjumlahkan penghasilan

teratur yang diterima pegawai tetap berupa gaji, tunjangan, premi JK, JKK dengan penghasilan tidak teratur yang berupa THR.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (1), jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Cara penentuan penghasilan bruto menurut PT. Madubaru yakni menjumlahkan penghasilan teratur yang diterima pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan dengan penghasilan tidak teratur yakni THR dan bonus. PT. Madubaru menghitung penghasilan teratur setahun ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur yakni THR.

Tabel 5.44 Perbandingan cara menentukan Penghasilan Neto sebulan yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan bruto	Penghasilan bruto = gaji pokok + tunjangan + THR dan bonus	Penghasilan bruto = gaji pokok + tunjangan + penghasilan tidak teratur (THR)	Cara menentukan penghasilan bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan penghasilan bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.45: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

FDW													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	jumlah penghasilan teratur	4,583,500.00	4,083,500.00	4,097,500.00	4,057,500.00	4,083,000.00	5,147,500.00	4,398,250.00	6,294,250.00	4,346,250.00	4,398,250.00	4,346,250.00	54,312,000.00
	jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000.00	49,002,000.00	49,170,000.00	48,690,000.00	48,996,000.00	61,770,000.00	52,779,000.00	75,531,000.00	52,155,000.00	52,779,000.00	52,155,000.00	54,312,000.00
3	THR								12,588,500.00				21,541,000.00
4	Bonus		3,270,000.00		3,270,000.00				3,545,000.00			3,545,000.00	17,175,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	55,002,000.00	52,272,000.00	49,170,000.00	51,960,000.00	48,996,000.00	61,770,000.00	52,779,000.00	91,664,500.00	52,155,000.00	52,779,000.00	55,700,000.00	93,028,000.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.46: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

FDW													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	jumlah penghasilan teratur	4,583,500.00	4,083,500.00	4,097,500.00	4,057,500.00	4,083,000.00	5,147,500.00	4,398,250.00	6,294,250.00	4,346,250.00	4,398,250.00	4,346,250.00	54,312,000.00
	jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000.00	49,002,000.00	49,170,000.00	48,690,000.00	48,996,000.00	61,770,000.00	52,779,000.00	75,531,000.00	52,155,000.00	52,779,000.00	52,155,000.00	54,312,000.00
3	THR								12,588,500.00				21,541,000.00
4	Bonus		3,270,000.00		3,270,000.00				3,545,000.00			3,545,000.00	17,175,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	55,002,000.00	52,272,000.00	49,170,000.00	51,960,000.00	48,996,000.00	61,770,000.00	52,779,000.00	91,664,500.00	52,155,000.00	52,779,000.00	55,700,000.00	93,028,000.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.47: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

JMD													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
	jumlah penghasilan teratur	2,258,600.00	2,258,600.00	2,284,600.00	2,232,600.00	2,258,600.00	2,284,600.00	2,284,600.00	3,027,000.00	2,829,000.00	2,881,000.00	2,829,000.00	
	jumlah penghasilan teratur setahun	27,103,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	26,791,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	27,415,200.00	36,324,000.00	33,948,000.00	34,572,000.00	33,948,000.00	30,887,200.00
3	THR								6,054,000.00				6,054,000.00
4	Bonus				1,532,000.00			1,782,000.00				1,782,000.00	6,878,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	27,103,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	28,323,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	29,197,200.00	42,378,000.00	33,948,000.00	34,572,000.00	35,730,000.00	43,819,200.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.48: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

JMD													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
	jumlah penghasilan teratur	2,258,600.00	2,258,600.00	2,284,600.00	2,232,600.00	2,258,600.00	2,284,600.00	2,284,600.00	3,027,000.00	2,829,000.00	2,881,000.00	2,829,000.00	
	jumlah penghasilan teratur setahun	27,103,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	26,791,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	27,415,200.00	36,324,000.00	33,948,000.00	34,572,000.00	33,948,000.00	30,887,200.00
3	THR								6,054,000.00				6,054,000.00
4	Bonus				1,532,000.00			1,782,000.00				1,782,000.00	6,878,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	27,103,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	28,323,200.00	27,103,200.00	27,415,200.00	29,197,200.00	42,378,000.00	33,948,000.00	34,572,000.00	35,730,000.00	43,819,200.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.49: Penghitungan Penghasilan Bruto yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

WNP													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	jumlah penghasilan teratur	1,798,700.00	1,798,700.00	1,824,700.00	1,772,700.00	1,798,700.00	2,034,700.00	2,034,700.00	2,980,700.00	1,982,700.00	2,034,700.00	1,982,700.00	
	jumlah penghasilan teratur setahun	21,584,400.00	21,584,400.00	21,896,400.00	21,272,400.00	21,584,400.00	24,416,400.00	24,416,400.00	35,768,400.00	23,792,400.00	24,416,400.00	23,792,400.00	24,406,400.00
3	THR								5,961,400.00				5,961,400.00
4	Bonus		1,094,000.00		1,094,000.00				1,294,000.00				4,776,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	21,584,400.00	22,678,400.00	21,896,400.00	22,366,400.00	21,584,400.00	24,416,400.00	24,416,400.00	43,023,800.00	23,792,400.00	24,416,400.00	23,792,400.00	35,143,800.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.50: Penghitungan Penghasilan Bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

WNP													
no	kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	gaji pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	jumlah penghasilan teratur	1,798,700.00	1,798,700.00	1,824,700.00	1,772,700.00	1,798,700.00	2,034,700.00	2,034,700.00	2,980,700.00	1,982,700.00	2,034,700.00	1,982,700.00	
	jumlah penghasilan teratur setahun	21,584,400.00	21,584,400.00	21,896,400.00	21,272,400.00	21,584,400.00	24,416,400.00	24,416,400.00	35,768,400.00	23,792,400.00	24,416,400.00	23,792,400.00	24,406,400.00
3	THR								5,961,400.00				5,961,400.00
4	Bonus		1,094,000.00		1,094,000.00				1,294,000.00				4,776,000.00
	jumlah penghasilan bruto setahun	21,584,400.00	22,678,400.00	21,896,400.00	22,366,400.00	21,584,400.00	24,416,400.00	24,416,400.00	43,023,800.00	23,792,400.00	24,416,400.00	23,792,400.00	35,143,800.00

Sumber : Data diolah

Dari penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan PT. Madubaru telah memasukkan komponen penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama setahun yakni berupa jumlah penghasilan teratur setahun dengan THR dan bonus.

Dalam menentukan penghasilan bruto setahun yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.

Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru adalah 5% dikalikan penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.

Tabel 5.51: Perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan biaya jabatan	Biaya jabatan = 5% x penghasilan bruto (maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun)	Biaya jabatan = 5% x penghasilan bruto (maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun)	Cara menentukan biaya jabatan yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan biaya jabatan yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.52: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

FDW													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	2,750,100	2,450,100	2,458,500	2,434,500	2,449,800	3,088,500	2,638,950	3,776,550	2,607,750	2,638,950	2,607,750	2,715,600
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								12,588,500.00				21,541,000.00
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus		3,270,000.00		3,270,000.00				3,545,000.00			3,545,000.00	17,175,000.00
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	163,500	-	163,500	-	-	-	177,250	-	-	177,250	858,750
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	629,425	-	-	-	1,077,050
	jumlah biaya jabatan	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400

Sumber : Data diolah

Tabel 5.53: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

FDW													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	2,750,100	2,450,100	2,458,500	2,434,500	2,449,800	3,088,500	2,638,950	3,776,550	2,607,750	2,638,950	2,607,750	2,715,600
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								12,588,500.00				21,541,000.00
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus		3,270,000.00		3,270,000.00				3,545,000.00			3,545,000.00	17,175,000.00
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	163,500	-	163,500	-	-	-	177,250	-	-	177,250	858,750
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	629,425	-	-	-	1,077,050
	jumlah biaya jabatan	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400

Sumber : Data diolah

Tabel 5.54: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

JMD													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,200
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,339,560	1,355,160	1,370,760	1,370,760	1,816,200	1,697,400	1,728,600	1,697,400	1,544,360
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								6,054,000				6,054,000
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	-	-	76,600	-	-	89,100	-	-	-	89,100	343,900
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	302,700	-	-	-	302,700
	jumlah biaya jabatan	1,355,160.00	1,355,160.00	1,370,760.00	1,416,160.00	1,355,160.00	1,370,760.00	1,459,860.00	2,118,900.00	1,697,400.00	1,728,600.00	1,786,500.00	2,190,960.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.55: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

JMD													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,200
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,339,560	1,355,160	1,370,760	1,370,760	1,816,200	1,697,400	1,728,600	1,697,400	1,544,360
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								6,054,000				6,054,000
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	-	-	76,600	-	-	89,100	-	-	-	89,100	343,900
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	302,700	-	-	-	302,700
	jumlah biaya jabatan	1,355,160.00	1,355,160.00	1,370,760.00	1,416,160.00	1,355,160.00	1,370,760.00	1,459,860.00	2,118,900.00	1,697,400.00	1,728,600.00	1,786,500.00	2,190,960.00

Sumber : Data diolah

Tabel 5.56: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

WNP													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	21,548,400	21,548,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	1,077,420	1,077,420	1,094,820	1,063,620	1,079,220	1,220,820	1,220,820	1,788,420	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,220,320
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								5,961,400				5,941,400
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	54,700	-	54,700	-	-	-	64,700	-	-	-	238,800
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	298,070	-	-	-	297,070
	jumlah biaya jabatan	1,077,420	1,132,120	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,756,190

Sumber : Data diolah

Tabel 5.57: Penghitungan Biaya Jabatan untuk penghasilan teratur dan tidak teratur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

WNP													
No	Kriteria	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	penghasilan teratur bruto setahun	21,548,400	21,548,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur	1,077,420	1,077,420	1,094,820	1,063,620	1,079,220	1,220,820	1,220,820	1,788,420	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,220,320
2	penghasilan tidak teratur berupa THR								5,961,400				5,941,400
3	penghasilan tidak teratur berupa bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Tarif	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Biaya Jabatan Penghasilan tidak Teratur	-	54,700	-	54,700	-	-	-	64,700	-	-	-	238,800
	biaya jabatan yang diperkenankan atas THR	-	-	-	-	-	-	-	298,070	-	-	-	297,070
	jumlah biaya jabatan	1,077,420	1,132,120	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,756,190

Sumber : Data diolah

Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan PT. Madubaru adalah menjumlahkan gaji pokok dengan tunjangan lainnya ditambah THR dan penghasilan tidak teratur lainnya kemudian dikalikan 5%. Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, iuran Jaminan Pensiun dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Besarnya iuran pensiun tiap-tiap pegawai ditentukan oleh perusahaan/pemberi kerja.

Penghitungan iuran pensiun tiap pegawai tetap yang dilakukan PT. Madubaru adalah gaji pokok dikalikan dengan tarif 2%.

Perbandingan cara menentukan iuran pensiun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.58: Perbandingan cara menentukan Iuran Pensiun menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan iuran pensiun	Iuran pensiun = Gaji pokok x 2 %	Iuran pensiun = Gaji pokok x tarif (besar tarif ditentukan perusahaan)	Cara menentukan iuran pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan iuran pensiun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.59: Perbandingan penghitungan Iuran Pensiun (dalam rupiah)

No	Kriteria	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Gaji Pokok	3.270.000	1.532.000	1.094.000	3.270.000	1.532.000	1.094.000
2	Iuran Pensiun	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Jumlah sebulan	65.400	30.640	21.880	65.400	30.640	21.880
	Jumlah setahun	784.800	367.680	262.560	784.800	367.680	262.560

Sumber : Data diolah

Cara menentukan iuran pensiun yang dilakukan PT. Madubaru adalah mengalikan gaji pokok dengan tarif yang ditentukan perusahaan sebesar 2%.

Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penentuan penghasilan neto setahun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Penentuan penghasilan neto setahun menurut PT. Madubaru adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dan astek.

Perbandingan cara menentukan penghasilan neto sebulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.60 Perbandingan penentuan penghasilan neto setahun menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan neto	Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan astek	Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dll	Cara menentukan penghasilan neto yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan penghasilan neto yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
2	Biaya Jabatan	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
3	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
4	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350

Sumber : Data diolah

Tabel 5.62 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
2	Biaya Jabatan	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
3	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
4	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350

Sumber : Data diolah

Tabel 5.63 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	28,947,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,480,000	43,069,200
2	Biaya Jabatan	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,447,360	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,774,000	2,153,460
3	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
4	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
Jumlah		24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,430,640	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,636,800	39,909,040

Sumber : Data diolah

Tabel 5.64 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	28,947,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,480,000	43,069,200
2	Biaya Jabatan	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,447,360	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,774,000	2,153,460
3	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
4	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
Jumlah		24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,430,640	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,636,800	39,909,040

Sumber : Data diolah

Tabel 5.65 Penghitungan penghasilan neto setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
2	Biaya Jabatan	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
3	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
4	Iuran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210

Sumber : Data diolah

Tabel 5.66 Penghitungan penghasilan neto setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan Bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
2	Biaya Jabatan	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
3	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
4	Iuran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penghitungan penghasilan neto yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penentuan PKP setahun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Cara menentukan PKP setahun menurut PT. Madubaru adalah penghasilan neto dikurangi PTKP.

Perbandingan cara menentukan PKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.67 Perbandingan cara menentukan PKP menurut PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PKP	PKP = penghasilan neto – PTKP	PKP = penghasilan neto – PTKP	Cara menentukan PKP setahun menurut PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan cara penentuan PKP yang dilakukan PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan PT. Madubaru didasarkan dari kriteria masing-masing pegawai. Setiap pegawai mempunyai kriteria yang berbeda dan mempengaruhi jumlah masing-masing PTKP. Jumlah masing-masing PTKP.

Jumlah masing-masing PTKP pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.68 Perbandingan penghitungan PTKP yang dikenakan (dalam rupiah)

No	Uraian	PT. Madubaru			Peraturan Perundang-undangan Perpajakan		
		FDW	JMD	WNP	FDW	JMD	WNP
1	Wajib pajak orang pribadi	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
2	Wajib pajak yang kawin	1,320,000	1,320,000		1,320,000	1,320,000	
3	Anggota keluarga sedarah dan	1,320,000	1,320,000		1,320,000	1,320,000	
Jumlah PTKP		18,480,000	18,480,000	15,840,000	18,480,000	18,480,000	15,840,000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.69 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,555,300	48,013,850	84,955,075	47,421,050	48,013,850	50,788,500	86,318,350
2	PTKP	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	Jumlah PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,075,300	29,533,850	66,475,075	28,941,050	29,533,850	32,308,500	67,838,350
	Pembulatan PKP												

Sumber : Data diolah

Tabel 5.70 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,555,300	48,013,850	84,955,075	47,421,050	48,013,850	50,788,500	86,318,350
2	PTKP	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	Jumlah PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,075,300	29,533,850	66,475,075	28,941,050	29,533,850	32,308,500	67,838,350
	Pembulatan PKP	31,809,000	29,216,000	26,269,000	28,920,000	26,104,000	38,075,000	29,533,000	66,475,000	28,941,000	29,533,000	32,308,000	67,838,000

Sumber : Data diolah

Tabel 5.71 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,430,640	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,636,800	39,909,040
2	PTKP	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	Jumlah PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	7,950,640	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,156,800	21,429,040
	Pembulatan PKP												

Sumber : Data diolah

Tabel 5.72 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,430,640	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,636,800	39,909,040
2	PTKP	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	Jumlah PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	7,950,640	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,156,800	21,429,040
	Pembulatan PKP	6,348,000	6,348,000	6,645,000	7,507,000	6,348,000	6,495,000	7,950,000	20,709,000	12,701,000	13,294,000	14,156,000	21,429,000

Sumber : Data diolah

Tabel 5.73 Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
2	PTKP	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	Jumlah PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	Pembulatan PKP												

Sumber : Data diolah

Tabel 5.74 Penghitungan penghasilan kena pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan neto setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
2	PTKP	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	Jumlah PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	Pembulatan PKP	4,008,000	5,048,000	4,305,000	4,751,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	24,256,000	5,986,000	6,579,000	5,986,000	16,820,000

Sumber : Data diolah

Penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah PKP dikalikan dengan PPh Pasal 17.

Cara penentuan PPh pasal 21 terutang setahun menurut PT. Madubaru adalah PKP dikalikan dengan PPh Pasal 17.

Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.75: Perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kriteria	PT. Madubaru	Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun	$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = \text{PKP} \times \text{PPh Pasal 17}$	$\text{PPh Pasal 21 terutang setahun} = \text{PKP} \times \text{PPh Pasal 17}$	Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru telah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru maupun peneliti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:



Tabel 5.76 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kena pajak	31,809,900	29,216,400	26,629,500	28,920,000	26,104,200	38,075,300	29,533,850	66,475,075	28,941,050	29,533,850	32,308,500	67,838,350
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	1,590,495	1,460,820	1,331,475	1,446,000	1,305,210	1,903,765	1,476,693	2,500,000	1,447,053	1,476,693	1,615,425	2,500,000
	15%								2,471,261				2,675,753
Jumlah		1,590,495	1,460,820	1,331,475	1,446,000	1,305,210	1,903,765	1,476,693	4,971,261	1,447,053	1,476,693	1,615,425	5,175,753

Sumber : Data diolah

Tabel 5.77 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kena pajak	31,809,000	29,216,000	26,629,000	28,920,000	26,104,000	38,075,000	29,533,000	66,475,000	28,941,000	29,533,000	32,308,000	67,838,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	1,590,450	1,460,800	1,331,450	1,446,000	1,305,200	1,903,750	1,476,650	2,500,000	1,447,050	1,476,650	1,615,400	2,500,000
	15%								2,471,250				2,675,700
Jumlah		1,590,450	1,460,800	1,331,450	1,446,000	1,305,200	1,903,750	1,476,650	4,971,250	1,447,050	1,476,650	1,615,400	5,175,700

Sumber : Data diolah

Tabel 5.78 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan oleh PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	7,950,640	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,156,800	21,429,040
2	Tarif pajak pasal 17												
	120% X 5%	380,930	380,930	398,714	450,470	380,930	389,714	477,038	1,242,594	762,084	797,652	849,408	1,285,742
	15%												
Jumlah		380,930	380,930	398,714	450,470	380,930	389,714	477,038	1,242,594	762,084	797,652	849,408	1,285,742

Sumber : Data diolah

Tabel 5.79 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	6,348,000	6,348,000	6,645,000	7,507,000	6,348,000	6,495,000	7,950,000	20,709,000	12,701,000	13,294,000	14,156,000	21,429,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	120% X 5%	380,880	380,880	398,700	450,420	380,880	389,700	477,000	1,242,540	762,060	797,640	849,360	1,285,740
	15%												
Jumlah		380,880	380,880	398,700	450,420	380,880	389,700	477,000	1,242,540	762,060	797,640	849,360	1,285,740

Sumber : Data diolah

Tabel 5.80 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun PT. Madubaru pada tahun 2012 (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	200,439	252,404	215,259	237,584	200,439	328,959	328,959	1,212,811	299,319	328,959	299,319	841,011
	15%												
Jumlah		200,439	252,404	215,259	237,584	200,439	328,959	328,959	1,212,811	299,319	328,959	299,319	841,011

Sumber : Data diolah

Tabel 5.81 Penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penghasilan kenapajak	4,008,000	5,048,000	4,305,000	4,751,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	24,256,000	5,986,000	6,579,000	5,986,000	16,820,000
2	Tarif pajak pasal 17												
	5%	200,400	252,400	215,250	237,550	200,400	328,950	328,950	1,212,800	299,300	328,950	299,300	841,000
	15%												
Jumlah		200,400	252,400	215,250	237,550	200,400	328,950	328,950	1,212,800	299,300	328,950	299,300	841,000

Sumber : Data diolah

Tabel 5.82 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	THR								12,588,500				21,541,000
	Bonus		3,270,000		3,270,000				3,545,000			3,545,000	17,175,000
	Penghasilan bruto setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,575,600	4,420,500	4,560,000	4,411,800	5,215,500	4,765,950	6,710,225	4,734,750	4,765,950	4,912,000	6,709,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,074,500	29,533,050	66,474,275	28,940,250	29,533,050	32,308,000	67,838,350
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	1,590,495	1,460,820	1,313,475	1,446,000	1,305,210	1,903,725	1,476,653	4,971,141	1,447,013	1,476,653	1,615,400	5,175,753

Sumber : Data diolah

Tabel 5.83 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	THR								12,588,500				21,541,000
	Bonus		3,270,000		3,270,000				3,545,000			3,545,000	17,175,000
	Penghasilan bruto setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,575,600	4,420,500	4,560,000	4,411,800	5,215,500	4,765,950	6,710,225	4,734,750	4,765,950	4,912,000	6,709,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,074,500	29,533,050	66,474,275	28,940,250	29,533,050	32,308,000	67,838,350
	PKP dibulatkan	31,809,000	29,216,000	26,269,000	28,920,000	26,104,000	38,074,000	29,533,000	66,474,000	28,940,000	29,533,000	32,308,000	67,838,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	1,590,450	1,460,800	1,313,450	1,446,000	1,305,200	1,903,700	1,476,650	4,971,100	1,447,000	1,476,650	1,615,400	5,175,700

Sumber : Data diolah

Tabel 5.84 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,000
	THR								6,054,000				6,054,000
	bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Penghasilan bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	29,197,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,730,000	43,819,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,459,860	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,786,500	2,190,950
	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,335,360	2,274,360	2,439,960	2,529,060	3,188,100	2,766,600	2,797,800	2,855,700	3,197,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,668,140	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,874,300	40,621,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	8,188,140	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,394,300	22,141,350
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	380,930	380,930	398,714	450,470	380,930	389,714	491,288	1,242,594	762,084	797,652	863,658	1,328,481

Sumber : Data diolah

Tabel 5.85 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,000
	THR								6,054,000				6,054,000
	bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Penghasilan bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	29,197,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,730,000	43,819,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,459,860	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,786,500	2,190,950
	Juran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Juran Aspek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,335,360	2,274,360	2,439,960	2,529,060	3,188,100	2,766,600	2,797,800	2,855,700	3,197,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,668,140	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,874,300	40,621,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	8,188,140	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,394,300	22,141,350
	PKP dibulatkan	6,348,000	6,348,000	6,645,000	7,057,000	6,348,000	6,495,000	8,188,000	22,526,000	12,701,000	13,294,000	14,394,000	22,141,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	380,880	380,880	398,700	423,420	380,880	389,700	491,280	1,351,560	762,060	797,640	863,640	1,328,460

Sumber : Data diolah

Tabel 5.86 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	THR								5,961,400				5,961,400
	Bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Penghasilan bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Iuran Aspek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,790,320	1,751,220	1,774,720	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,927,590	1,966,020	1,997,220	1,966,020	2,483,590
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	200,439	252,404	215,259	237,584	200,439	328,959	328,959	1,212,811	299,319	328,959	299,319	841,011

Sumber : Data diolah

Tabel 5.87 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	THR								5,961,400				5,961,400
	Bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Penghasilan bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Iuran Aspek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,790,320	1,751,220	1,774,720	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,927,590	1,966,020	1,997,220	1,966,020	2,483,590
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	PKP dibulatkan	4,008,000	5,048,000	4,305,000	4,751,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	24,256,000	5,986,000	6,579,000	5,986,000	16,820,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	200,400	252,400	215,250	237,550	200,400	328,950	328,950	1,212,800	299,300	328,950	299,300	841,000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun yang dilakukan PT. Madubaru terdapat kesalahan yaitu pada jumlah PKP antara PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tersebut karena jumlah PKP dari PT. Madubaru tidak dibulatkan.

Berdasarkan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, PT. Madubaru tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur terdiri dari beberapa langkah, yaitu: menentukan jumlah penghasilan bruto, menentukan jumlah penghasilan neto, menentukan besarnya PTKP, menentukan PKP, dan menentukan jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun. Penghasilan teratur yang diterima pegawai terdiri dari gaji, tunjangan, premi JK dan JKK. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 5 menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur.

Penentuan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru adalah menentukan jumlah penghasilan bruto, menentukan jumlah

penghasilan neto, menentukan besarnya PTKP, menentukan PKP, dan menentukan jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.88 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,000	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,000	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000
	Jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,764,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,450,100	2,458,500	2,434,500	2,449,800	3,088,200	2,638,950	3,776,550	2,607,750	2,638,950	2,607,750	2,715,600
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,412,100	4,420,500	4,396,500	4,411,800	5,215,200	4,765,950	5,903,550	4,734,750	4,765,950	4,734,750	4,773,850
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	44,589,900	44,749,500	44,293,500	44,584,200	56,548,800	48,013,050	69,627,450	47,420,250	48,013,050	47,420,250	49,538,150
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	26,109,900	26,269,500	25,813,500	26,104,200	38,068,800	29,533,050	51,147,450	28,940,250	29,533,050	28,940,250	31,058,150
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun	1,590,495	1,305,495	1,313,475	1,290,675	1,305,210	1,903,440	1,476,653	2,672,118	1,447,013	1,476,653	1,447,013	1,552,908

Sumber : Data diolah

Tabel 5.89 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,000	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,000	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	54,312,000
	Jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,764,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,450,100	2,458,500	2,434,500	2,449,800	3,088,200	2,638,950	3,776,550	2,607,750	2,638,950	2,607,750	2,715,600
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,412,100	4,420,500	4,396,500	4,411,800	5,215,200	4,765,950	5,903,550	4,734,750	4,765,950	4,734,750	4,773,850
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	44,589,900	44,749,500	44,293,500	44,584,200	56,548,800	48,013,050	69,627,450	47,420,250	48,013,050	47,420,250	49,538,150
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	26,109,900	26,269,500	25,813,500	26,104,200	38,068,800	29,533,050	51,147,450	28,940,250	29,533,050	28,940,250	31,058,150
	PKP dibulatkan	31,809,000	26,109,000	26,269,000	25,813,000	26,104,000	36,068,000	29,533,000	51,147,000	28,940,000	29,533,000	28,940,000	31,058,000
	PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun	1,590,450	1,305,450	1,313,450	1,290,650	1,305,200	1,803,400	1,476,650	2,672,050	1,447,000	1,476,650	1,447,000	1,552,900

Sumber : Data diolah

Tabel 5.90 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,200
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,339,560	1,355,160	1,370,760	1,370,760	1,816,200	1,697,400	1,728,600	1,697,400	1,544,360
	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,258,760	2,274,360	2,439,960	2,439,960	2,885,400	2,766,600	2,797,800	2,766,600	2,551,060
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	24,532,440	24,828,840	24,975,240	24,975,240	33,438,600	31,181,400	31,774,200	31,181,400	28,336,140
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	6,052,440	6,348,840	6,495,240	6,495,240	14,958,600	12,701,400	13,294,200	12,701,400	9,856,140
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	380,930	380,930	398,714	363,146	380,930	389,714	389,714	897,516	762,084	797,652	762,084	591,368

Sumber : Data diolah

Tabel 5.91 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,200
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,200
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,339,560	1,355,160	1,370,760	1,370,760	1,816,200	1,697,400	1,728,600	1,697,400	1,544,360
	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,258,760	2,274,360	2,439,960	2,439,960	2,885,400	2,766,600	2,797,800	2,766,600	2,551,060
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	24,532,440	24,828,840	24,975,240	24,975,240	33,438,600	31,181,400	31,774,200	31,181,400	28,336,140
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	6,052,440	6,348,840	6,495,240	6,495,240	14,958,600	12,701,400	13,294,200	12,701,400	9,856,140
	PKP dibulatkan	6,348,000	6,348,000	6,645,000	6,052,000	6,348,000	6,495,000	6,495,000	14,958,000	12,701,000	13,294,000	12,701,000	9,856,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	380,880	380,880	398,700	363,120	380,880	389,700	389,700	897,480	762,060	797,640	762,060	591,360

Sumber : Data diolah

Tabel 5.92 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,079,220	1,094,820	1,063,620	1,079,220	1,220,820	1,220,820	1,788,420	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,220,320
	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Iuran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,735,620	1,751,220	1,720,020	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,564,820	1,966,020	1,997,220	1,966,020	1,946,720
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	19,848,780	20,145,180	19,552,380	19,848,780	22,419,180	22,419,180	33,203,580	21,826,380	22,419,180	21,826,380	22,459,680
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	4,008,780	4,305,180	3,712,380	4,008,780	6,579,180	6,579,180	17,363,580	5,986,380	6,579,180	5,986,380	6,619,680
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	200,439	200,439	215,259	185,619	200,439	328,959	328,959	868,179	299,319	328,959	299,319	330,984

Sumber : Data diolah

Tabel 5.93 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	24,406,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,079,220	1,094,820	1,063,620	1,079,220	1,220,820	1,220,820	1,788,420	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,220,320
	Juran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Juran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,735,620	1,751,220	1,720,020	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,564,820	1,966,020	1,997,220	1,966,020	1,946,720
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	19,848,780	20,145,180	19,552,380	19,848,780	22,419,180	22,419,180	33,203,580	21,826,380	22,419,180	21,826,380	22,459,680
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	4,008,780	4,305,180	3,712,380	4,008,780	6,579,180	6,579,180	17,363,580	5,986,380	6,579,180	5,986,380	6,619,680
	PKP dibulatkan	4,008,000	4,008,000	4,305,000	3,712,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	17,363,000	5,986,000	6,579,000	5,986,000	6,619,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	200,400	200,400	215,250	185,600	200,400	328,950	328,950	868,150	299,300	328,950	299,300	330,950

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan penghitungan penghasilan teratur PT. Madubaru telah memasukkan komponen cara menentukan jumlah penghasilan bruto, cara menentukan jumlah penghasilan neto, cara menentukan besarnya PTKP, cara menentukan PKP, dan cara menentukan jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun.

Berdasarkan penentuan penghasilan teratur yang dilakukan, PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

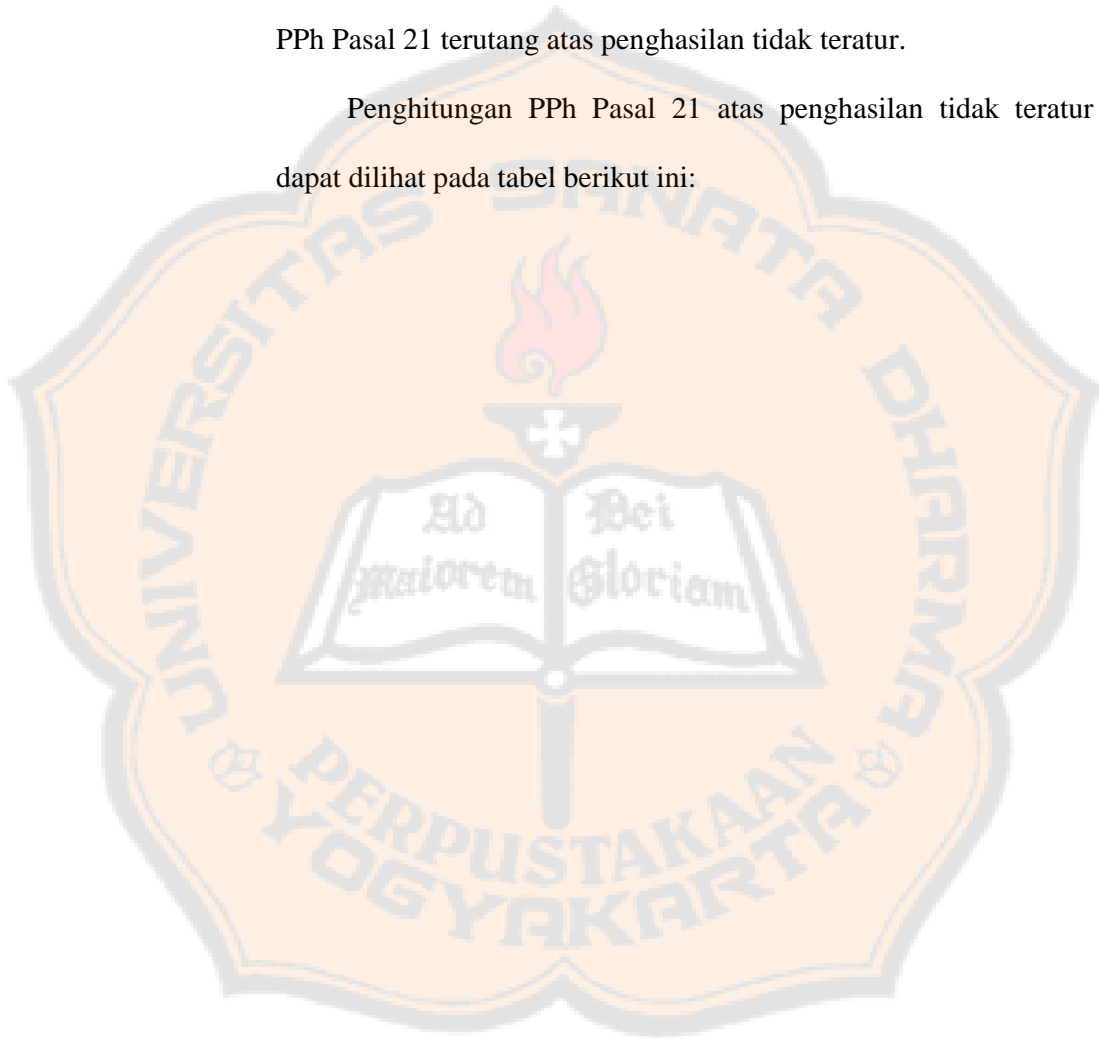
3) Cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 1 ayat (16), penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan yang selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 14 ayat (3), PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur berupa THR adalah selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan THR dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur.

Cara penentuan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur menurut PT. Madubaru yakni dengan

melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur berupa THR kemudian diselisihkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur sehingga didapatkan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.94 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	
	Jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	THR								12,588,500				21,541,000
	Penghasilan tidak teratur berupa bonus		3,270,000		3,270,000				3,545,000			3,545,000	17,175,000
	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,575,600	4,420,500	4,560,000	4,411,800	5,215,500	4,765,950	6,710,225	4,734,750	4,765,950	4,912,000	6,709,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,074,500	29,533,050	66,474,275	28,940,250	29,533,050	32,308,000	67,838,350
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	1,590,495	1,460,820	1,313,475	1,446,000	1,305,210	1,903,725	1,476,653	4,971,141	1,447,013	1,476,653	1,615,400	5,175,753
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan teratur	1,590,495	1,305,495	1,313,475	1,290,450	1,305,210	1,803,725	1,476,653	2,672,050	1,447,013	1,476,653	1,450,612	1,552,908
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan tidak teratur	-	155,325	-	155,550	-	100,000	-	2,299,091	-	-	164,788	3,622,845

Sumber : Data diolah

Tabel 5.95 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	FDW											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	3,545,000	41,165,000
2	Tunjangan	1,313,500	813,500	827,500	787,500	813,000	1,602,500	853,250	2,749,250	801,250	853,250	801,250	13,147,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	4,583,500	4,083,500	4,097,500	4,057,500	4,083,000	5,147,500	4,398,250	6,294,250	4,346,250	4,398,250	4,346,250	
	Jumlah penghasilan teratur setahun	55,002,000	49,002,000	49,170,000	48,690,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	75,531,000	52,155,000	52,779,000	52,155,000	54,312,000
	THR								12,588,500				21,541,000
	Penghasilan tidak teratur berupa bonus		3,270,000		3,270,000				3,545,000				3,545,000
	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	55,002,000	52,272,000	49,170,000	51,960,000	48,996,000	61,770,000	52,779,000	91,664,500	52,155,000	52,779,000	55,700,000	93,028,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	2,750,100	2,613,600	2,458,500	2,598,000	2,449,800	3,088,500	2,638,950	4,583,225	2,607,750	2,638,950	2,785,000	4,651,400
	Iuran Pensiun	784,800	784,800	784,800	784,800	784,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	850,800	823,300
	Iuran Astek	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,177,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,276,200	1,234,950
	Jumlah Pengurang	4,712,100	4,575,600	4,420,500	4,560,000	4,411,800	5,215,500	4,765,950	6,710,225	4,734,750	4,765,950	4,912,000	6,709,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	50,289,900	47,696,400	44,749,500	47,400,000	44,584,200	56,554,500	48,013,050	84,954,275	47,420,250	48,013,050	50,788,000	86,318,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	31,809,900	29,216,400	26,269,500	28,920,000	26,104,200	38,074,500	29,533,050	66,474,275	28,940,250	29,533,050	32,308,000	67,838,350
	PKP dibulatkan	31,809,000	29,216,000	26,269,000	28,920,000	26,104,000	38,074,000	29,533,000	66,474,000	28,940,000	29,533,000	32,308,000	67,838,000
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	1,590,450	1,460,800	1,313,450	1,446,000	1,305,200	1,903,700	1,476,650	4,971,100	1,447,000	1,476,650	1,615,400	5,175,700
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan teratur	1,590,450	1,305,450	1,313,450	1,290,450	1,305,200	1,803,400	1,476,650	2,672,050	1,447,000	1,476,650	1,447,000	1,552,900
	PPh Pasal 21 terutang setahun atas penghasilan tidak teratur	-	155,350	-	155,550	-	100,300	-	2,299,050	-	-	168,400	3,622,800

Sumber : Data diolah

Tabel 5.96 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,000
	THR								6,054,000				6,054,000
	penghasilan tidak teratur berupa bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Penghasilan bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	29,197,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,730,000	43,819,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,459,860	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,786,500	2,190,950
	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,335,360	2,274,360	2,439,960	2,529,060	3,188,100	2,766,600	2,797,800	2,855,700	3,197,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,668,140	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,874,300	40,621,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	8,188,140	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,394,300	22,141,350
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	380,930	380,930	398,714	450,470	380,930	389,714	491,288	1,242,594	762,084	797,652	863,658	1,328,481
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur	380,930	380,930	398,714	363,134	380,930	389,714	389,714	897,516	762,084	797,652	762,084	591,368
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan tidak teratur	0	0	0	87,336	0	0	101,574	345,078	-	-	101,574	737,113

Sumber : Data diolah

Tabel 5.97 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	JMD											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	20,134,000
2	Tunjangan	726,600	726,600	752,600	700,600	726,600	502,600	502,600	1,245,000	1,047,000	1,099,000	1,047,000	10,753,000
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	2,258,600	2,258,600	2,284,600	2,232,600	2,258,600	2,284,600	2,284,600	3,027,000	2,829,000	2,881,000	2,829,000	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	26,791,200	27,103,200	27,415,200	27,415,200	36,324,000	33,948,000	34,572,000	33,948,000	30,887,000
	THR								6,054,000				6,054,000
	penghasilan tidak teratur berupa bonus				1,532,000			1,782,000				1,782,000	6,878,000
	Penghasilan bruto setahun	27,103,200	27,103,200	27,415,200	28,323,200	27,103,200	27,415,200	29,197,200	42,378,000	33,948,000	34,572,000	35,730,000	43,819,000
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,355,160	1,355,160	1,370,760	1,416,160	1,355,160	1,370,760	1,459,860	2,118,900	1,697,400	1,728,600	1,786,500	2,190,950
	Iuran Pensiun	367,680	367,680	367,680	367,680	367,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	427,680	402,680
	Iuran Astek	551,520	551,520	551,520	551,520	551,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	641,520	604,020
	Jumlah Pengurang	2,274,360	2,274,360	2,289,960	2,335,360	2,274,360	2,439,960	2,529,060	3,188,100	2,766,600	2,797,800	2,855,700	3,197,650
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	24,828,840	24,828,840	25,125,240	25,987,840	24,828,840	24,975,240	26,668,140	39,189,900	31,181,400	31,774,200	32,874,300	40,621,350
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP K/1	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000
	PKP	6,348,840	6,348,840	6,645,240	7,507,840	6,348,840	6,495,240	8,188,140	20,709,900	12,701,400	13,294,200	14,394,300	22,141,350
	PKP dibulatkan	6,348,000	6,348,000	6,645,000	7,057,000	6,348,000	6,495,000	8,188,000	20,709,000	12,701,000	13,294,000	14,394,000	22,141,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	380,880	380,880	398,700	423,420	380,880	389,700	491,280	1,242,540	762,060	797,640	863,640	1,328,460
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur	380,880	380,880	398,700	363,120	380,880	389,700	389,700	897,480	762,060	797,640	762,060	591,360
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan tidak teratur	-	-	-	60,300	-	-	101,580	345,060	-	-	101,580	737,100

Sumber : Data diolah

Tabel 5.98 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur menurut PT. Madubaru (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	THR								5,961,400				5,961,400
	penghasilan tidak teratur berupa bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Penghasilan bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
	Iuran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Iuran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,790,320	1,751,220	1,774,720	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,927,590	1,966,020	1,997,220	1,966,020	2,483,590
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	PKP dibulatkan												
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	200,439	252,404	215,259	237,584	200,439	328,959	328,959	1,212,811	299,319	328,959	299,319	841,011
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur	200,439	200,439	215,259	185,619	200,439	328,959	328,959	868,179	299,319	328,959	299,319	330,984
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan tidak teratur	-	51,965	-	51,965	-	-	-	344,632	-	-	-	510,027

Sumber : Data diolah

Tabel 5.99 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (dalam rupiah)

No	Kriteria	WNP											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji Pokok	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	14,528,000
2	Tunjangan	704,700	704,700	730,700	678,700	704,700	740,700	740,700	1,686,700	688,700	740,700	688,700	9,878,400
	Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan	1,798,700	1,798,700	1,824,700	1,772,700	1,798,700	2,034,700	2,034,700	2,980,700	1,982,700	2,034,700	1,982,700	
	Jumlah Penghasilan Teratur Setahun	21,584,400	21,584,400	21,896,400	21,272,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	35,768,400	23,792,400	24,416,400	23,792,400	24,406,400
	THR								5,961,400				5,961,400
	penghasilan tidak teratur berupa bonus		1,094,000		1,094,000				1,294,000				4,776,000
	Penghasilan bruto setahun	21,584,400	22,678,400	21,896,400	22,366,400	21,584,400	24,416,400	24,416,400	43,023,800	23,792,400	24,416,400	23,792,400	35,143,800
	Biaya Jabatan												
	5% X Penghasilan Bruto	1,079,220	1,133,920	1,094,820	1,118,320	1,079,220	1,220,820	1,220,820	2,151,190	1,189,620	1,220,820	1,189,620	1,757,190
	Juran Pensiun	262,560	262,560	262,560	262,560	262,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	310,560	290,560
	Juran Astek	393,840	393,840	393,840	393,840	393,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	465,840	435,840
	Jumlah Pengurang	1,735,620	1,790,320	1,751,220	1,774,720	1,735,620	1,997,220	1,997,220	2,927,590	1,966,020	1,997,220	1,966,020	2,483,590
	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	19,848,780	20,888,080	20,145,180	20,591,680	19,848,780	22,419,180	22,419,180	40,096,210	21,826,380	22,419,180	21,826,380	32,660,210
	Penghitungan PPh Pasal 21												
	PTKP TK/0	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
	PKP	4,008,780	5,048,080	4,305,180	4,751,680	4,008,780	6,579,180	6,579,180	24,256,210	5,986,380	6,579,180	5,986,380	16,820,210
	PKP dibulatkan	4,008,000	5,048,000	4,305,000	4,751,000	4,008,000	6,579,000	6,579,000	24,256,000	5,986,000	6,579,000	5,986,000	16,820,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur dan tidak teratur	200,400	252,400	215,250	237,550	200,400	328,950	328,950	1,212,800	299,300	328,950	299,300	841,000
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan teratur	200,400	200,400	215,250	185,600	200,400	328,950	328,950	868,150	299,300	328,950	299,300	330,950
	PPh Pasal 21 Terutang Setahun atas penghasilan tidak teratur	-	52,000	-	51,950	-	-	-	344,650	-	-	-	510,050

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur PT. Madubaru telah memasukkan komponen PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan THR dan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur.

Berdasarkan penentuan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan, PT. Madubaru telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pembahasan

Pembahasan tentang item-item perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat dalam daftar gaji pegawai tetap di PT. Madubaru adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 Terutang atas Penghasilan Teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur terdiri dari beberapa langkah, yaitu: cara menentukan penghasilan bruto sebulan, cara menentukan neto sebulan, cara menentukan penghasilan neto setahun, cara menentukan PKP setahun, cara menentukan PPh Pasal 21 sebulan.

a. Penentuan Penghasilan bruto sebulan

PT. Madubaru menentukan jumlah penghasilan bruto sebulan diterima atau diperoleh sebulan yakni dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 5 menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh

pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun teratur. Pengertian penghasilan yang bersifat teratur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Pasal 1 yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk uang lembur. Cara penentuan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Penghasilan neto sebulan

PT. Madubaru menentukan jumlah penghasilan neto dengan cara mengurangi jumlah penghasilan bruto dengan pengurang penghasilan yang terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun dan astek. Biaya jabatan yang dikenakan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Iuran pensiun yang dikenakan sebesar 2% dari gaji yang diterima pegawai tetap.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3) menyatakan besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun; serta

urusan yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan PT. Madubaru dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Penentuan penghasilan netto setahun

PT. Madubaru menentukan penghasilan netto setahun yakni penghasilan netto sebulan dikalikan 12 (dua belas) bulan. Penentuan penghasilan netto setahun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas). Berdasarkan cara penentuan yang dilakukan PT. Madubaru dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru sudah mengacu pada perundang-undangan perpajakan.

d. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun

PT. Madubaru menentukan Penghasilan Kena Pajak yakni penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah PKP belum dibulatkan dalam ribuan penuh. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 17 ayat (4) menyatakan bahwa jumlah PKP sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dibulatkan hingga ribuan penuh. Besarnya PTKP sesuai dengan

kriteria masing-masing pegawai. Berdasarkan penentuan PKP yang dilakukan PT. Madubaru dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru belum mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun

PT. Madubaru menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun yakni jumlah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap yang mempunyai NPWP diperoleh dengan mengalikan PKP dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan PT. Madubaru sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

f. Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan

PT. Madubaru menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan diperoleh dari PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12 (dua belas). Penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 Pasal 14 ayat 3 yakni atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas). Berdasarkan cara penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan PT. Madubaru dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. PPh Pasal 21 Terutang atas Penghasilan Tidak Teratur

Penghitungan jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur terdiri dari beberapa langkah, antara lain: cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur, cara menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur, dan cara menentukan dengan menselisihkan antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur.

- a. PT. Madubaru dalam menentukan jumlah penghasilan bruto atas penghasilan teratur dan tidak teratur yaitu menjumlahkan penghasilan teratur yang diterima pegawai tetap berupa gaji, tunjangan, dengan penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai berupa THR.

PT. Madubaru dalam menentukan jumlah penghasilan neto atas penghasilan tidak teratur sama halnya dengan penentuan penghasilan neto atas penghasilan teratur, yaitu dengan cara mengurangi jumlah penghasilan bruto dengan pengurang penghasilan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan 5%. Berdasarkan penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru maka dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

- b. PT. Madubaru dalam menentukan jumlah penghasilan teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur terdiri dari beberapa langkah, yaitu: cara menentukan penghasilan bruto sebulan,

cara menentukan penghasilan neto sebulan, cara menentukan penghasilan neto setahun, cara menentukan PKP setahun, cara menentukan PPh Pasal 21 sebulan. Cara yang digunakan dalam menentukan dalam menentukan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap yang memiliki NPWP diperoleh dengan mengalikan PKP dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

c. PT. Madubaru dalam menentukan jumlah penghasilan tidak teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur berupa THR yang dilakukan PT. Madubaru diperoleh dengan mengurangkan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur. Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur berupa THR adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan PT. Madubaru dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada tabel berikut penulis akan menyajikan selisih dari perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT.

Madubaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku :

Tabel 5.100 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Teratur (dalam rupiah)

No	Nama	PT. Madubaru		Ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan		Selisih	
		PKP	PPh 21/Th	PKP	PPh 21/Th	PKP	PPh 21/Th
1	FDW	31.058.150	1.552.908	31.058.000	1.552.900	(150)	(8)
2	JMD	9.856.140	591.368	9.856.000	591.360	(140)	(8)
3	WNP	6.619.680	330.984	6.619.000	330.950	(680)	(34)

Sumber : Data diolah

Tabel 5.101 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Tahun Pajak 2012 atas Penghasilan Tidak Teratur (dalam rupiah)

No	Nama	PT. Madubaru		Ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan		Selisih	
		PKP	PPh 21/Th	PKP	PPh 21/Th	PKP	PPh 21/Th
1	FDW	57.752.300	3.662.845	57.752.000	3.662.800	(300)	(45)
2	JMD	14.742.660	737.133	14.742.000	737.100	(660)	(33)
3	WNP	10.200.540	510.027	10.201.000	510.050	460	23

Sumber : Data diolah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Hanya saja dalam penerapan penghitungan PPh 21 terutang terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagian yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yaitu dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang, PT. Madubaru tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 17 ayat 4 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh. Hal ini dikarenakan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang PT. Madubaru menggunakan program Microsoft Excel sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara hasil penghitungan Pajak

Penghasilan 21 terutang yang dilakukan oleh PT. Madubaru dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Hanya saja dalam penerapan penghitungan PPh 21 terutang terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagian yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yaitu dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang, PT. Madubaru tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyajikan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat:

1. Bagi PT. Madubaru

Untuk menerapkan dan menghitung pajak terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lebih baik, PT. Madubaru sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai penghitungan dalam hal pembulatan jumlah penghasilan kena pajak dalam rupiah penuh.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendapat perusahaan yang dapat memberikan data secara lengkap beserta dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran data yang diberikan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto.2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi Pertama. BPFPE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____ Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*
- _____ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang *Besarnya Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*.
- _____ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

_____ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang
*Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan*



LAMPIRAN



Lampiran 1 :

Data penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Madubaru tahun 2012 (tabel ada pada halaman berikutnya) :



No	Nama	Jumlah Gaji	B. Jabatan	B. Astek dan luran Pensiun	Neto	PTKP	PKP	PPH 5 %	PPH 15%	PPh 21
1	MK_001	127,938,114	6,396,906	3,156,420	118,384,788	19,800,000	98,584,788	2,500,000	7,287,718	9,787,718
2	MK_002	95,532,428	4,776,621	2,859,660	87,896,147	19,800,000	68,096,147	2,500,000	2,714,422	5,214,422
3	MK_003	85,157,364	4,257,868	1,438,704	79,460,792	21,120,000	58,340,792	2,500,000	1,251,119	3,751,119
4	MK_004	91,975,960	4,598,798	1,394,748	85,982,414	18,480,000	67,502,414	2,500,000	2,625,362	5,125,362
5	MK_005	85,379,220	4,268,961	1,350,792	79,759,467	15,840,000	63,919,467	2,500,000	2,087,920	4,587,920
6	MK_006	103,332,710	5,166,636	1,306,836	96,859,239	21,120,000	75,739,239	2,500,000	3,860,886	6,360,886
7	MK_007	96,040,420	4,802,021	1,215,286	90,023,113	19,800,000	70,223,113	2,500,000	3,033,467	5,533,467
8	MK_008	92,604,982	4,630,249	1,196,156	86,778,577	18,480,000	68,298,577	2,500,000	2,744,787	5,244,787
9	MK_009	76,538,240	3,826,912	1,192,056	71,519,272	17,160,000	54,359,272	2,500,000	653,890	3,153,890
10	MK_010	77,285,852	3,864,293	1,185,496	72,236,063	21,120,000	51,116,063	2,500,000	167,410	2,667,410
11	MK_011	93,583,303	4,679,165	1,146,134	87,758,004	19,800,000	67,958,004	2,500,000	2,693,701	5,193,701
12	MK_012	78,445,966	3,922,298	1,038,824	73,484,844	19,800,000	53,684,844	2,500,000	552,727	3,052,727
13	MK_013	50,870,484	2,543,524	850,939	47,476,021	15,840,000	31,636,021	1,581,801		1,581,801
14	MK_014	73,632,040	3,681,602	1,067,414	68,883,024	18,480,000	50,403,024	2,500,000	60,454	2,560,454
15	MK_015	72,283,916	3,614,196	1,031,326	67,638,394	18,480,000	49,158,394	2,457,920		2,457,920
16	MK_016	72,065,738	3,603,287	1,537,825	66,924,626	18,480,000	48,444,626	2,422,231		2,422,231
17	MK_017	95,077,510	4,753,876	1,420,425	88,903,210	18,480,000	70,423,210	2,500,000	3,063,481	5,563,481
18	MK_018	92,517,335	4,625,867	1,369,858	86,521,610	19,800,000	66,721,610	2,500,000	2,508,242	5,008,242
19	MK_019	94,938,810	4,746,941	1,400,195	88,791,675	19,800,000	68,991,675	2,500,000	2,848,751	5,348,751
20	MK_020	98,033,302	4,901,665	1,395,332	91,736,305	19,800,000	71,936,305	2,500,000	3,290,446	5,790,446
21	MK_021	92,286,600	4,614,330	1,351,584	86,320,686	19,800,000	66,520,686	2,500,000	2,478,103	4,978,103
22	MK_022	82,608,359	4,130,418	1,330,651	77,147,290	18,480,000	58,667,290	2,500,000	1,300,094	3,800,094
23	MK_023	83,238,947	4,161,947	1,325,156	77,751,844	19,800,000	57,951,844	2,500,000	1,192,777	3,692,777
24	MK_024	84,423,516	4,221,176	1,292,818	78,909,522	21,120,000	57,789,522	2,500,000	1,168,428	3,668,428
25	MK_025	112,889,851	5,644,493	1,216,381	106,028,977	19,800,000	86,228,977	2,500,000	5,434,347	7,934,347
26	MK_026	77,446,427	3,872,321	1,187,136	72,386,970	19,800,000	52,586,970	2,500,000	388,045	2,888,045
27	MK_027	81,960,550	4,098,028	1,152,696	76,709,827	17,160,000	59,549,827	2,500,000	1,432,474	3,932,474
28	MK_028	78,500,633	3,925,032	1,124,816	73,450,785	19,800,000	53,650,785	2,500,000	547,618	3,047,618
29	MK_029	78,185,210	3,909,261	1,072,334	73,203,616	21,120,000	52,083,616	2,500,000	312,542	2,812,542
30	MK_030	72,681,120	3,634,056	1,037,885	68,009,179	18,480,000	49,529,179	2,476,459		2,476,459
31	MK_031	72,262,061	3,613,103	1,049,878	67,599,080	19,800,000	47,799,080	2,389,954		2,389,954
32	MK_032	87,583,900	4,379,195	2,056,051	81,148,654	17,160,000	63,988,654	2,500,000	2,099,798	4,599,798
33	MK_033	90,410,074	4,520,504	1,428,516	84,461,054	18,480,000	65,981,054	2,500,000	2,397,158	4,897,158
34	MK_034	88,068,010	4,403,401	1,379,157	82,285,453	19,800,000	62,485,453	2,500,000	1,872,818	4,372,818
35	MK_035	84,081,707	4,204,085	1,342,236	78,535,386	18,480,000	60,055,386	2,500,000	1,508,308	4,008,308
36	MK_036	84,919,956	4,245,998	1,275,710	79,398,248	19,800,000	59,598,248	2,500,000	1,439,737	3,939,737
37	MK_037	79,877,822	3,993,891	1,200,200	74,683,731	19,800,000	54,883,731	2,500,000	732,560	3,232,560
38	MK_038	101,183,988	5,059,199	1,056,112	95,068,677	19,800,000	75,268,677	2,500,000	3,790,301	6,290,301
39	MK_039	108,947,057	5,447,353	3,324,222	100,175,482	19,800,000	80,375,482	2,500,000	4,556,322	7,056,322
40	MK_040	98,202,746	4,910,137	1,428,633	91,863,976	18,480,000	73,383,976	2,500,000	3,507,596	6,007,596
41	MK_041	81,819,329	4,090,966	1,189,568	76,538,795	21,120,000	55,418,795	2,500,000	812,819	3,312,819
42	MK_042	80,004,155	4,000,208	1,136,294	74,867,653	21,120,000	53,747,653	2,500,000	562,148	3,062,148
43	MK_043	71,876,557	3,593,828	1,649,877	66,632,852	18,480,000	48,152,852	2,407,643		2,407,643
44	MK_044	190,208,011	9,510,401	3,772,168	176,925,442	19,800,000	157,125,442	2,500,000	16,068,816	18,568,816
45	MK_045	80,320,685	4,016,034	1,434,410	74,870,241	19,800,000	55,070,241	2,500,000	760,536	3,260,536
46	MK_046	80,724,249	4,036,212	1,218,951	75,469,086	18,480,000	56,989,086	2,500,000	1,048,363	3,548,363
47	MK_047	86,601,623	4,330,081	1,089,720	81,181,822	19,800,000	61,381,822	2,500,000	1,707,273	4,207,273
48	MK_048	56,001,153	2,800,058	993,263	52,207,832	19,800,000	32,407,832	1,620,392		1,620,392

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Nama	Jumlah Gaji	B. Jabatan	B. Astek dan luran Pensiun	Neto	PTKP	PKP	PPH 5 %	PPH 15%	Pph 21
49	MK_049	50,166,776	2,508,339	793,876	46,864,561	19,800,000	27,064,561	1,353,228		1,353,228
50	MK_050	40,567,417	2,028,371	729,377	37,809,669	19,800,000	18,009,669	900,483		900,483
51	MK_051	40,152,226	2,007,611	732,079	37,412,536	18,480,000	18,932,536	946,627		946,627
52	MK_052	36,276,044	1,813,802	502,019	33,960,223	19,800,000	14,160,223	708,011		708,011
53	MK_053	38,553,445	1,927,672	716,723	35,909,050	19,800,000	16,109,050	805,452		805,452
54	MK_054	39,693,005	1,984,650	712,568	36,995,787	17,160,000	19,835,787	991,789		991,789
55	MK_055	39,122,681	1,956,134	711,628	36,454,919	19,800,000	16,654,919	832,746		832,746
56	MK_056	37,683,122	1,884,156	701,807	35,097,159	19,800,000	15,297,159	764,858		764,858
57	MK_057	42,456,932	2,122,847	692,005	39,642,080	19,800,000	19,842,080	992,104		992,104
58	MK_058	37,731,723	1,886,586	703,467	35,141,670	21,120,000	14,021,670	701,083		701,083
59	MK_059	36,542,875	1,827,144	697,127	34,018,604	21,120,000	12,898,604	644,930		644,930
60	MK_060	35,417,451	1,770,873	678,863	32,967,715	15,840,000	17,127,715	856,386		856,386
61	MK_061	35,512,027	1,775,601	643,582	33,092,844	21,120,000	11,972,844	598,642		598,642
62	MK_062	34,160,416	1,708,021	639,035	31,813,360	15,840,000	15,973,360	798,668		798,668
63	MK_063	33,326,970	1,666,349	621,699	31,038,923	19,800,000	11,238,923	561,946		561,946
64	MK_064	33,856,178	1,692,809	630,003	31,533,366	19,800,000	11,733,366	586,668		586,668
65	MK_065	31,159,404	1,557,970	578,669	29,022,765	18,480,000	10,542,765	527,138		527,138
66	MK_066	31,678,412	1,583,921	571,638	29,522,853	18,480,000	11,042,853	552,143		552,143
67	MK_067	30,865,126	1,543,256	571,638	28,750,232	18,480,000	10,270,232	513,512		513,512
68	MK_068	42,226,267	2,111,313	797,175	39,317,779	21,120,000	18,197,779	909,889		909,889
69	MK_069	40,811,307	2,040,565	754,612	38,016,130	18,480,000	19,536,130	976,806		976,806
70	MK_070	29,411,155	1,470,558	436,948	27,503,649	19,800,000	7,703,649	385,182		385,182
71	MK_071	41,337,407	2,066,870	739,445	38,531,092	19,800,000	18,731,092	936,555		936,555
72	MK_072	39,446,329	1,972,316	726,258	36,747,755	18,480,000	18,267,755	913,388		913,388
73	MK_073	42,556,261	2,127,813	666,303	39,762,145	18,480,000	21,282,145	1,064,107		1,064,107
74	MK_074	39,026,990	1,951,350	700,635	36,375,006	18,480,000	17,895,006	894,750		894,750
75	MK_075	43,684,682	2,184,234	737,711	40,762,737	21,120,000	19,642,737	982,137		982,137
76	MK_076	40,433,543	2,021,677	716,671	37,695,195	19,800,000	17,895,195	894,760		894,760
77	MK_077	36,953,923	1,847,696	700,895	34,405,332	19,800,000	14,605,332	730,267		730,267
78	MK_078	44,746,165	2,237,308	644,842	41,864,015	17,160,000	24,704,015	1,235,201		1,235,201
79	MK_079	48,065,599	2,403,280	713,389	44,948,930	18,480,000	26,468,930	1,323,447		1,323,447
80	MK_080	38,543,119	1,927,156	681,849	35,934,114	18,480,000	17,454,114	872,706		872,706
81	MK_081	36,708,358	1,835,418	642,781	34,230,159	21,120,000	13,110,159	655,508		655,508
82	MK_082	34,612,195	1,730,610	654,639	32,226,946	21,120,000	11,106,946	555,347		555,347
83	MK_083	33,500,568	1,675,028	629,065	31,196,475	19,800,000	11,396,475	569,824		569,824
84	MK_084	50,783,803	2,539,190	577,930	47,666,683	18,480,000	29,186,683	1,459,334		1,459,334
85	MK_085	38,476,618	1,923,831	747,332	35,805,455	19,800,000	16,005,455	800,273		800,273
86	MK_086	29,875,842	1,493,792	731,191	27,650,859	21,120,000	6,530,859	326,543		326,543
87	MK_087	37,559,734	1,877,987	729,492	34,952,255	19,800,000	15,152,255	757,613		757,613
88	MK_088	26,283,731	1,314,187	607,289	24,362,255	21,120,000	3,242,255	162,113		162,113
89	MK_089	31,555,650	1,577,783	578,827	29,399,041	15,840,000	13,559,041	813,542		813,542
90	MK_090	49,788,525	2,489,426	774,918	46,524,181	19,800,000	26,724,181	1,336,209		1,336,209
91	MK_091	42,411,729	2,120,586	743,832	39,547,311	21,120,000	18,427,311	921,366		921,366
92	MK_092	46,947,619	2,347,381	751,886	43,848,352	19,800,000	24,048,352	1,202,418		1,202,418
93	MK_093	38,824,008	1,941,200	723,913	36,158,895	19,800,000	16,358,895	817,945		817,945
94	MK_094	38,103,361	1,905,168	724,684	35,473,509	19,800,000	15,673,509	783,675		783,675
95	MK_095	37,179,254	1,858,963	719,496	34,600,795	19,800,000	14,800,795	740,040		740,040
96	MK_096	39,261,635	1,963,082	706,418	36,592,135	21,120,000	15,472,135	773,607		773,607

No	Nama	Jumlah Gaji	B. Jabatan	B. Astek dan luran Pensiun	Neto	PTKP	PKP	PPH 5 %	PPH 15%	Pph 21
97	MK_097	45,588,486	2,279,424	698,620	42,610,442	19,800,000	22,810,442	1,140,522		1,140,522
98	MK_098	36,874,490	1,843,725	673,830	34,356,936	21,120,000	13,236,936	661,847		661,847
99	MK_099	34,382,323	1,719,116	611,807	32,051,400	18,480,000	13,571,400	678,570		678,570
100	MK_100	33,135,640	1,656,782	623,791	30,855,067	18,480,000	12,375,067	618,753		618,753
101	MK_101	35,261,825	1,763,091	622,620	32,876,114	19,800,000	13,076,114	653,806		653,806
102	MK_102	33,167,211	1,658,361	619,092	30,889,758	18,480,000	12,409,758	620,488		620,488
103	MK_103	33,973,006	1,698,650	613,244	31,661,112	18,480,000	13,181,112	659,056		659,056
104	MK_104	32,656,810	1,632,841	594,354	30,429,616	19,800,000	10,629,616	531,481		531,481
105	MK_105	31,925,597	1,596,280	591,528	29,737,789	18,480,000	11,257,789	562,889		562,889
106	MK_106	31,460,418	1,573,021	585,789	29,301,608	19,800,000	9,501,608	475,080		475,080
107	MK_107	45,899,137	2,294,957	785,489	42,818,691	19,800,000	23,018,691	1,150,935		1,150,935
108	MK_108	31,411,245	1,570,562	744,337	29,096,346	18,480,000	10,616,346	530,817		530,817
109	MK_109	42,704,498	2,135,225	712,484	39,856,789	18,480,000	21,376,789	1,068,839		1,068,839
110	MK_110	32,643,106	1,632,155	703,467	30,307,484	19,800,000	10,507,484	525,374		525,374
111	MK_111	29,625,612	1,481,281	668,328	27,476,003	18,480,000	8,996,003	449,800		449,800
112	MK_112	47,982,308	2,399,115	698,892	44,884,301	19,800,000	25,084,301	1,254,215		1,254,215
113	MK_113	32,228,758	1,611,438	692,212	29,925,108	17,160,000	12,765,108	638,255		638,255
114	MK_114	35,352,015	1,767,601	666,312	32,918,102	19,800,000	13,118,102	655,905		655,905
115	MK_115	29,558,380	1,477,919	652,684	27,427,777	19,800,000	7,627,777	381,389		381,389
116	MK_116	38,738,608	1,936,930	644,509	36,157,169	18,480,000	17,677,169	883,858		883,858
117	MK_117	33,127,965	1,656,398	630,193	30,841,374	19,800,000	11,041,374	552,069		552,069
118	MK_118	32,942,884	1,647,144	620,647	30,675,093	19,800,000	10,875,093	543,755		543,755
119	MK_119	32,076,910	1,603,846	614,201	29,858,864	19,800,000	10,058,864	502,943		502,943
120	MK_120	34,710,009	1,735,500	598,668	32,375,841	19,800,000	12,575,841	628,792		628,792
121	MK_121	26,841,618	1,342,081	515,944	24,983,593	15,840,000	9,143,593	457,180		457,180
122	MK_122	32,623,269	1,631,163	745,245	30,246,861	15,840,000	14,406,861	720,343		720,343
123	MK_123	30,358,034	1,517,902	741,546	28,098,586	15,840,000	12,258,586	612,929		612,929
124	MK_124	33,770,574	1,688,529	723,002	31,359,043	18,480,000	12,879,043	643,952		643,952
125	MK_125	39,406,368	1,970,318	695,614	36,740,436	19,800,000	16,940,436	847,022		847,022
126	MK_126	35,426,942	1,771,347	696,037	32,959,558	19,800,000	13,159,558	657,978		657,978
127	MK_127	28,487,754	1,424,388	638,396	26,424,970	19,800,000	6,624,970	331,249		331,249
128	MK_128	28,397,113	1,419,856	625,515	26,351,742	18,480,000	7,871,742	393,587		393,587
129	MK_129	33,299,659	1,664,983	594,354	31,040,322	18,480,000	12,560,322	628,016		628,016
130	MK_130	33,007,807	1,650,390	733,104	30,624,313	19,800,000	10,824,313	541,216		541,216
131	MK_131	33,940,496	1,697,025	714,972	31,528,499	18,480,000	13,048,499	652,425		652,425
132	MK_132	29,925,850	1,496,293	654,701	27,774,857	21,120,000	6,654,857	332,743		332,743
133	MK_133	77,780,890	3,889,045	741,440	73,150,406	18,480,000	54,670,406	2,733,520		2,733,520
134	MK_134	48,600,815	2,430,041	745,245	45,425,529	19,800,000	25,625,529	1,281,276		1,281,276
135	MK_135	40,421,343	2,021,067	692,751	37,707,525	19,800,000	17,907,525	895,376		895,376
136	MK_136	40,399,474	2,019,974	707,802	37,671,698	21,120,000	16,551,698	827,585		827,585
137	MK_137	41,123,061	2,056,153	674,161	38,392,747	19,800,000	18,592,747	929,637		929,637
138	MK_138	44,140,248	2,207,012	637,857	41,295,379	19,800,000	21,495,379	1,074,769		1,074,769
139	MK_139	36,236,089	1,811,804	644,888	33,779,397	18,480,000	15,299,397	764,970		764,970
140	MK_140	54,284,807	2,714,240	637,857	50,932,710	19,800,000	31,132,710	1,556,635		1,556,635
141	MK_141	36,715,000	1,835,750	624,043	34,255,207	19,800,000	14,455,207	722,760		722,760
142	MK_142	36,195,768	1,809,788	621,436	33,764,544	19,800,000	13,964,544	698,227		698,227
143	MK_143	34,350,754	1,717,538	613,724	32,019,492	19,800,000	12,219,492	610,975		610,975
144	MK_144	31,115,421	1,555,771	582,185	28,977,465	19,800,000	9,177,465	458,873		458,873

No	Nama	Jumlah Gaji	B. Jabatan	B. Astek dan luran Pensiun	Neto	PTKP	PKP	PPH 5 %	PPH 15%	PPh 21
145	MK_145	110,767,068	5,538,353	771,620	104,457,095	19,800,000	84,657,095	2,500,000	5,198,564	7,698,564
146	MK_146	45,294,677	2,264,734	555,224	42,474,719	19,800,000	22,674,719	1,133,736		1,133,736
147	MK_147	44,655,411	2,232,771	679,981	41,742,659	18,480,000	23,262,659	1,163,133		1,163,133
148	MK_148	33,916,301	1,695,815	611,562	31,608,924	18,480,000	13,128,924	656,446		656,446
149	MK_149	39,067,336	1,953,367	595,060	36,518,909	19,800,000	16,718,909	835,945		835,945
150	MK_150	43,047,380	2,152,369	830,681	40,064,330	17,160,000	22,904,330	1,145,217		1,145,217

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta



Lampiran 2

Data Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan (tahun 2012) untuk sampel FDW

JANUARI	
Gaji Pokok	3,270,000
Tunjangan	1,313,500
Jumlah sebulan	4,583,500
Jumlah setahun	55,002,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	55,002,000
Biaya Jabatan	2,750,100
Iuran Pensiun	784,800
Astek	1,177,200
Jumlah Pengurang	4,712,100
Penghasilan neto setahun	50,289,900
PTKP	18,480,000
PKP	31,809,900
PPh 21	1,590,495

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

FEBRUARI	
Gaji Pokok	3,270,000
Tunjangan	813,500
Jumlah sebulan	4,083,500
Jumlah setahun	49,002,000
THR	
Bonus	3,270,000
Penghasilan bruto setahun	52,272,000
Biaya Jabatan	2,613,600
Iuran Pensiun	784,800
Astek	1,177,200
Jumlah Pengurang	4,575,600
Penghasilan neto setahun	47,696,400
PTKP	18,480,000
PKP	29,216,400
PPh 21	1,460,820

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MARET	
Gaji Pokok	3,270,000
Tunjangan	827,500
Jumlah sebulan	4,097,500
Jumlah setahun	49,170,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	49,170,000
Biaya Jabatan	2,458,500
Iuran Pensiun	784,800
Astek	1,177,200
Jumlah Pengurang	4,420,500
Penghasilan neto setahun	44,749,500
PTKP	18,480,000
PKP	26,269,500
PPh 21	1,313,475

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

APRIL	
Gaji Pokok	3,270,000
Tunjangan	787,500
Jumlah sebulan	4,057,500
Jumlah setahun	48,690,000
THR	
Bonus	3,270,000
Penghasilan bruto setahun	51,960,000
Biaya Jabatan	2,598,000
Iuran Pensiun	784,800
Astek	1,177,200
Jumlah Pengurang	4,560,000
Penghasilan neto setahun	47,400,000
PTKP	18,480,000
PKP	28,920,000
PPh 21	1,446,000

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MEI	
Gaji Pokok	3,270,000
Tunjangan	813,000
Jumlah sebulan	4,083,000
Jumlah setahun	48,996,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	48,996,000
Biaya Jabatan	2,449,800
Iuran Pensiun	784,800
Astek	1,177,200
Jumlah Pengurang	4,411,800
Penghasilan neto setahun	44,584,200
PTKP	18,480,000
PKP	26,104,200
PPh 21	1,305,210

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JUNI	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	1,602,500
Jumlah sebulan	5,147,500
Jumlah setahun	61,770,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	61,770,000
Biaya Jabatan	3,088,500
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	5,215,500
Penghasilan neto setahun	56,554,500
PTKP	18,480,000
PKP	38,074,500
PPh 21	1,903,725

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JULI	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	853,250
Jumlah sebulan	4,398,250
Jumlah setahun	52,779,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	52,779,000
Biaya Jabatan	2,638,950
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	4,765,950
Penghasilan neto setahun	48,013,050
PTKP	18,480,000
PKP	29,533,050
PPh 21	1,476,653

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

AGUSTUS	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	2,749,250
Jumlah sebulan	6,294,250
Jumlah setahun	75,531,000
THR	12,588,500
Bonus	3,545,000
Penghasilan bruto setahun	91,664,500
Biaya Jabatan	4,583,225
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	6,710,225
Penghasilan neto setahun	84,954,275
PTKP	18,480,000
PKP	66,474,275
PPh 21	4,971,141

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

SEPTEMBER	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	801,250
Jumlah sebulan	4,346,250
Jumlah setahun	52,155,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	52,155,000
Biaya Jabatan	2,607,750
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	4,734,750
Penghasilan neto setahun	47,420,250
PTKP	18,480,000
PKP	28,940,250
PPh 21	1,447,013

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

OKTOBER	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	853,250
Jumlah sebulan	4,398,250
Jumlah setahun	52,779,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	52,779,000
Biaya Jabatan	2,638,950
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	4,765,950
Penghasilan neto setahun	48,013,050
PTKP	18,480,000
PKP	29,533,050
PPh 21	1,476,653

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

NOVEMBER	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	801,250
Jumlah sebulan	4,346,250
Jumlah setahun	52,155,000
THR	
Bonus	3,545,000
Penghasilan bruto setahun	55,700,000
Biaya Jabatan	2,785,000
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	4,912,000
Penghasilan neto setahun	50,788,000
PTKP	18,480,000
PKP	32,308,000
PPh 21	1,615,400

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

DESEMBER	
Gaji Pokok	3,545,000
Tunjangan	931,250
Jumlah sebulan	4,476,250
Jumlah setahun	53,715,000
THR	8,952,500
Bonus	3,545,000
Penghasilan bruto setahun	66,212,500
Biaya Jabatan	3,310,625
Iuran Pensiun	850,800
Astek	1,276,200
Jumlah Pengurang	5,437,625
Penghasilan neto setahun	60,774,875
PTKP	18,480,000
PKP	42,294,875
PPh 21	2,114,744

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

Lampiran 3

Data Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan (tahun 2012) untuk sampel JMD

JANUARI	
Gaji Pokok	1,532,000
Tunjangan	726,600
Jumlah sebulan	2,258,600
Jumlah setahun	27,103,200
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	27,103,200
Biaya Jabatan	1,355,160
Iuran Pensiun	367,680
Astek	551,520
Jumlah Pengurang	2,274,360
Penghasilan neto setahun	24,828,840
PTKP	18,480,000
PKP	6,348,840
PPh 21	380,930

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

FEBRUARI	
Gaji Pokok	1,532,000
Tunjangan	726,600
Jumlah sebulan	2,258,600
Jumlah setahun	27,103,200
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	27,103,200
Biaya Jabatan	1,355,160
Iuran Pensiun	367,680
Astek	551,520
Jumlah Pengurang	2,274,360
Penghasilan neto setahun	24,828,840
PTKP	18,480,000
PKP	6,348,840
PPh 21	380,930

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MARET	
Gaji Pokok	1,532,000
Tunjangan	752,600
Jumlah sebulan	2,284,600
Jumlah setahun	27,415,200
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	27,415,200
Biaya Jabatan	1,370,760
Iuran Pensiun	367,680
Astek	551,520
Jumlah Pengurang	2,289,960
Penghasilan neto setahun	25,125,240
PTKP	18,480,000
PKP	6,645,240
PPh 21	398,714

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

APRIL	
Gaji Pokok	1,532,000
Tunjangan	700,600
Jumlah sebulan	2,232,600
Jumlah setahun	26,791,200
THR	
Bonus	1,532,000
Penghasilan bruto setahun	28,323,200
Biaya Jabatan	1,416,160
Iuran Pensiun	367,680
Astek	551,520
Jumlah Pengurang	2,335,360
Penghasilan neto setahun	25,987,840
PTKP	18,480,000
PKP	7,507,840
PPh 21	450,470

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MEI	
Gaji Pokok	1,532,000
Tunjangan	726,600
Jumlah sebulan	2,258,600
Jumlah setahun	27,103,200
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	27,103,200
Biaya Jabatan	1,355,160
Iuran Pensiun	367,680
Astek	551,520
Jumlah Pengurang	2,274,360
Penghasilan neto setahun	24,828,840
PTKP	18,480,000
PKP	6,348,840
PPh 21	380,930

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JUNI	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	502,600
Jumlah sebulan	2,284,600
Jumlah setahun	27,415,200
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	27,415,200
Biaya Jabatan	1,370,760
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	2,439,960
Penghasilan neto setahun	24,975,240
PTKP	18,480,000
PKP	6,495,240
PPh 21	389,714

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JULI	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	502,600
Jumlah sebulan	2,284,600
Jumlah setahun	27,415,200
THR	
Bonus	1,782,000
Penghasilan bruto setahun	29,197,200
Biaya Jabatan	1,459,860
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	2,529,060
Penghasilan neto setahun	26,668,140
PTKP	18,480,000
PKP	8,188,140
PPh 21	491,288

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

AGUSTUS	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	1,245,000
Jumlah sebulan	3,027,000
Jumlah setahun	36,324,000
THR	6,054,000
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	42,378,000
Biaya Jabatan	2,118,900
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	3,188,100
Penghasilan neto setahun	39,189,900
PTKP	18,480,000
PKP	20,709,900
PPh 21	1,242,594

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

SEPTEMBER	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	1,047,000
Jumlah sebulan	2,829,000
Jumlah setahun	33,948,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	33,948,000
Biaya Jabatan	1,697,400
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	2,766,600
Penghasilan neto setahun	31,181,400
PTKP	18,480,000
PKP	12,701,400
PPh 21	762,084

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

OKTOBER	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	1,099,000
Jumlah sebulan	2,881,000
Jumlah setahun	34,572,000
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	34,572,000
Biaya Jabatan	1,728,600
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	2,797,800
Penghasilan neto setahun	31,774,200
PTKP	18,480,000
PKP	13,294,200
PPh 21	797,652

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

NOVEMBER	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	1,047,000
Jumlah sebulan	2,829,000
Jumlah setahun	33,948,000
THR	
Bonus	1,782,000
Penghasilan bruto setahun	35,730,000
Biaya Jabatan	1,786,500
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	2,855,700
Penghasilan neto setahun	32,874,300
PTKP	18,480,000
PKP	14,394,300
PPh 21	863,658

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

DESEMBER	
Gaji Pokok	1,782,000
Tunjangan	1,677,000
Jumlah sebulan	3,459,000
Jumlah setahun	41,508,000
THR	
Bonus	1,782,000
Penghasilan bruto setahun	43,290,000
Biaya Jabatan	2,164,500
Iuran Pensiun	427,680
Astek	641,520
Jumlah Pengurang	3,233,700
Penghasilan neto setahun	40,056,300
PTKP	18,480,000
PKP	21,576,300
PPh 21	1,294,578

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

Lampiran 4

Data Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan (tahun 2012) untuk sampel WNP

JANUARI	
Gaji Pokok	1,094,000
Tunjangan	704,700
Jumlah sebulan	1,798,700
Jumlah setahun	21,584,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	21,584,400
Biaya Jabatan	1,079,220
Iuran Pensiun	262,560
Astek	393,840
Jumlah Pengurang	1,735,620
Penghasilan neto setahun	19,848,780
PTKP	15,840,000
PKP	4,008,780
PPh 21	200,439

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

FEBRUARI	
Gaji Pokok	1,094,000
Tunjangan	704,700
Jumlah sebulan	1,798,700
Jumlah setahun	21,584,400
THR	
Bonus	1,094,000
Penghasilan bruto setahun	22,678,400
Biaya Jabatan	1,133,920
Iuran Pensiun	262,560
Astek	393,840
Jumlah Pengurang	1,790,320
Penghasilan neto setahun	20,888,080
PTKP	15,840,000
PKP	5,048,080
PPh 21	252,404

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MARET	
Gaji Pokok	1,094,000
Tunjangan	730,700
Jumlah sebulan	1,824,700
Jumlah setahun	21,896,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	21,896,400
Biaya Jabatan	1,094,820
Iuran Pensiun	262,560
Astek	393,840
Jumlah Pengurang	1,751,220
Penghasilan neto setahun	20,145,180
PTKP	15,840,000
PKP	4,305,180
PPh 21	215,259

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

APRIL	
Gaji Pokok	1,094,000
Tunjangan	678,700
Jumlah sebulan	1,772,700
Jumlah setahun	21,272,400
THR	
Bonus	1,094,000
Penghasilan bruto setahun	22,366,400
Biaya Jabatan	1,118,320
Iuran Pensiun	262,560
Astek	393,840
Jumlah Pengurang	1,774,720
Penghasilan neto setahun	20,591,680
PTKP	15,840,000
PKP	4,751,680
PPh 21	237,584

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

MEI	
Gaji Pokok	1,094,000
Tunjangan	704,700
Jumlah sebulan	1,798,700
Jumlah setahun	21,584,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	21,584,400
Biaya Jabatan	1,079,220
Iuran Pensiun	262,560
Astek	393,840
Jumlah Pengurang	1,735,620
Penghasilan neto setahun	19,848,780
PTKP	15,840,000
PKP	4,008,780
PPh 21	200,439

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JUNI	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	740,700
Jumlah sebulan	2,034,700
Jumlah setahun	24,416,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	24,416,400
Biaya Jabatan	1,220,820
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	1,997,220
Penghasilan neto setahun	22,419,180
PTKP	15,840,000
PKP	6,579,180
PPh 21	328,959

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

JULI	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	740,700
Jumlah sebulan	2,034,700
Jumlah setahun	24,416,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	24,416,400
Biaya Jabatan	1,220,820
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	1,997,220
Penghasilan neto setahun	22,419,180
PTKP	15,840,000
PKP	6,579,180
PPh 21	328,959

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

AGUSTUS	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	1,686,700
Jumlah sebulan	2,980,700
Jumlah setahun	35,768,400
THR	5,961,400
Bonus	1,294,000
Penghasilan bruto setahun	43,023,800
Biaya Jabatan	2,151,190
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	2,927,590
Penghasilan neto setahun	40,096,210
PTKP	15,840,000
PKP	24,256,210
PPh 21	1,212,811

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

SEPTEMBER	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	688,700
Jumlah sebulan	1,982,700
Jumlah setahun	23,792,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	23,792,400
Biaya Jabatan	1,189,620
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	1,966,020
Penghasilan neto setahun	21,826,380
PTKP	15,840,000
PKP	5,986,380
PPh 21	299,319

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

OKTOBER	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	740,700
Jumlah sebulan	2,034,700
Jumlah setahun	24,416,400
THR	
Bonus	
Penghasilan bruto setahun	24,416,400
Biaya Jabatan	1,220,820
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	1,997,220
Penghasilan neto setahun	22,419,180
PTKP	15,840,000
PKP	6,579,180
PPh 21	328,959

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

NOVEMBER	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	688,700
Jumlah sebulan	1,982,700
Jumlah setahun	23,792,400
THR	
Bonus	3,545,000
Penghasilan bruto setahun	27,337,400
Biaya Jabatan	1,366,870
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	2,143,270
Penghasilan neto setahun	25,194,130
PTKP	15,840,000
PKP	9,354,130
PPh 21	467,707

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta

DESEMBER	
Gaji Pokok	1,294,000
Tunjangan	1,068,700
Jumlah sebulan	2,362,700
Jumlah setahun	28,352,400
THR	
Bonus	1,294,000
Penghasilan bruto setahun	29,646,400
Biaya Jabatan	1,482,320
Iuran Pensiun	310,560
Astek	465,840
Jumlah Pengurang	2,258,720
Penghasilan neto setahun	27,387,680
PTKP	15,480,000
PKP	11,907,680
PPh 21	595,384

Sumber: PT. Madu Baru ,Yogyakarta